PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG

Tangerang Gemilang

KABUPATEN TANGERANG SMART CITY

RINGKASAN
METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024 [BAGIAN 1]



Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tangerang

opendata.tangerangkab.go.id

SATU DATA INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG

RINGKASAN
METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024 [BAGIAN 1]



Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tangerang

opendata.tangerangkab.go.id

SATU DATA INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RINGKASAN METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

Ukuran Buku : 21 cm x 29.7 cm

Jumlah Halaman : viii+ 294 halaman

Tim Penyusun

Pengarah:

Rudi Lesmana, AP, M.Si

Penanggung Jawab:

Dra. Budi Lestari, M.Si

Penyunting:

Engkos Kosasih, S.E

Hera Faizal Rachmat, S.Si, M.Si

Design dan Kompilator:

Lismayani Usman, S.Si

Mellisa Edrianingtyas, S.Kom

Swastessa Damayanti, S.Stat

Windyana Pusparani, S.Stat

Diterbitkan oleh:

©Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2024

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang!

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami menyambut baik terbitnya Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024, yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai walidata tingkat daerah. Buku ini berisi informasi tambahan terkait data hasil kegiatan statistik yang dihimpun dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan walidata untuk menyebarluaskan data beserta metadatanya.

Buku Metadata Statistik Sektoral ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai data, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat lebih tepat. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, karena kesalahan dalam data dapat berujung pada kesimpulan atau kebijakan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, buku ini memiliki urgensi yang besar untuk memberikan manfaat, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Upaya pemutakhiran informasi dalam buku ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dari sahabat data untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keberkahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tercurah dalam segala linimasa kehidupan kita. *Aamiin.*

Tangerang, November 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tangerang

Rudi Lesmana, AP, M.Si
NIP. 19750506 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu prinsip agar suatu data dikatakan berkualitas yakni memiliki metadata. Metadata Statistik ialah informasi terkait data statistik yang tertuang dalam format baku yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik selaku Pembina data.

Penyusunan buku metadata ini terbagi menjadi 4 bagian utama yakni Metadata Statistik Kegiatan (MS-KEG), Metadata Statistik Variabel (MS-VAR), Metadata Statistik Indikator (MS-IND) dan Standar Data. MS-KEG, MS-VAR, MS-IND dan Standar Data yang disusun dalam Buku ini merupakan informasi mengenai data dari kegiatan statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Kami berharap Buku Metadata ini dapat membawa kebermanfaatan bagi Sahabat Data sekalian melalui kemudahan menemukan dan pengelolaan data serta pencegahan intrepretasi yang keliru dari data yang tersedia.

Kami menyadari Buku Ringkasan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ini tak dapat tersusun tanpa kerja sama dari *stakeholder* yang ada yakni Perangkat Daerah selaku produsen data dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang selaku Pembina data tingkat daerah Kabupaten Tangerang. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak terkait. Semoga sinergitas ini semakin solid terjalin, Selain itu, kami menyadari bahwa perlunya dilakukan penyempurnaan kualitas dari muatan metadata yang ada. Olehnya itu, saran dan kritik dari pengguna data masih sangat kami harapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam Satu Data!

Tangerang, November 2024
Kepala Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tangerang

Dra. Budi Lestari, M.Si.
NIP. 19690921 199203 2 007

DAFTAR ISI

COVER.....i
SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....vi
METADATA STATISTIK KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
MS-KEG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.....1
MS-KEG SEKRETARIAT DAERAH.....17
MS-KEG INSPEKTORAT.....33
MS-KEG BADAN PENDAPATAN DAERAH.....41
MS-KEG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....51
MS-KEG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....64
MS-KEG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....81
MS-KEG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....86
MS-KEG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....94
MS-KEG DINAS PENDIDIKAN.....113
MS-KEG DINAS KESEHATAN.....137
MS-KEG DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR.....237
MS-KEG DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN.....253
MS-KEG DINAS SOSIAL.....264
MS-KEG DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN.....278
MS-KEG DINAS TENAGA KERJA.....285

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DPRD

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa, Tangerang Banten, 15720
Email	:	dprd.kabtng@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat	:	Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa Jl. Somawinata No.1 Tigaraksa, Tangerang Banten, 15720
Email	:	dprd.kabtng@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Pemutakhiran data anggota DPRD dan program-program kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data kondisi jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin dan partai politiknya, komisinya dan mengetahui data persidangan serta kegiatan yang telah diselenggarakan DPRD. Data tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan kursi dprd yang diduduki menurut partai politik dan seluruh perkembangan keadaannya. Anggota DPRD

dapat berubah dengan kondisi sesuai pengganti antar waktu, sebagai contoh karena pindah partai politik atau berhalangan karena sakit atau meninggal.

Tujuan Kegiatan : Mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah anggota DPRD dan persidangan yang diselenggarakan di DPRD sebagai pertimbangan pembuatan keputusan

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2024 s.d. 13 januari 2024
Pengumpulan Data	01 Februari 2024 s.d. 17 Februari 2024
Pengolahan	18 Februari 2024 s.d. 31 Maret 2024
Analisis	01 April 2024 s.d. 31Mei 2024
Diseminasi	01 Juni 2024 s.d. 15 Juni 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD
- Nama Anggota DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Tangerang Menurut Fraksi
- Nama Anggota DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Tangerang Menurut Komisi
- Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai dan Jenis Kelamin
- Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Partai dan Pendidikan
- Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
- Jumlah Sidang Pleno/Paripurna DPRD Menurut Bulan dan Jenis Sidang
- Jumlah Produk Hukum DPRD
- Jumlah Produk Hukum Daerah
- Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Tangerang menurut Kepanitiaan
- Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Menurut Kelompok Umur

Referensi Waktu : Desember 2023

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	*Mail*
Unit Pengumpulan Data	:	DPRD Kabupaten Tangerang

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	DPRD Kabupaten Tangerang
Tingkat Penyajian Data	:	1. Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DPRD

Nama Variabel	:	Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Alias	:	Tabel 3.1.2 kol (1)
Konsep	:	DPRD, Partai politik
Definisi	:	Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota
Referensi Pemilihan	:	UU no 17 tahun 2014 UU no. 23 tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Fraksi
Alias	:	Tabel 3.1.3 kol (2)
Konsep	:	DPRD, Fraksi DPRD, Partai politik

Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Fraksi (PDIP + Hanura, Gerindra, Golkar + Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Komisi
Alias	:	Tabel 3.1.4 kol (2)
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III, IV)
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter

Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.1.5 kol (4)
Konsep	:	DPRD, Partai Politik, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut partai dan Jenis Kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Referensi Pemilihan	:	– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenjang Pendidikan
Alias	:	Tabel 3.1.6 kol (2) – (5)
Konsep	:	DPRD, Partai politik, Jenjang pendidikan

Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai dan jenjang pendidikan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Partai dan Pendidikan Formal. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Referensi Pemilihan	:	– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.1.7 kol (4)
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Komisi danJenis Kelamin.

		Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III,IV)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Sidang Pleno/Paripurna menurut kategori sidang dan Bulan
Alias	:	Tabel 3.1.8
Konsep	:	Sidang
Definisi	:	Jumlah Rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang dilaksanakan setiap bulan. Kategori sidang yaitu Istimewa, Biasa dan Internal
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.1.9 kol (4)
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	setiap keputusan ketetapan peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban. Produk hukum yang dimaksud terdiri dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	:	2021 - 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum (Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, Peraturan Daerah)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum Daerah DPRD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.1.10 kol (2) – (3)
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinanDPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Jenis Produk Hukum Daerah yang dikatagorikanmenurut kategori Raperda, yaitu raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif

Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Referensi Waktu	:	2021 - 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum daerah (Raperda Eksekutif, Raperda Inisiatif, Raperda Daftar Kumulatif Terbuka)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kepanitiaan
Alias	:	Tabel 3.1.11 kol (2) – (5)
Konsep	:	DPRD
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Alat Kelengkapan Daerah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
Referensi Pemilihan	:	– Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

		17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	:	2022 - 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis kepanitiaan (Badan musyawarah, Badan Anggaran)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Usia
Alias	:	Tabel 3.1.12 kol (2) – (5)
Konsep	:	DPRD, Usia/Umur
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur adalah anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yangdikategorikan menurut kelompok umur
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Aturan Validasi		Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Publik

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DPRD

Nama Variabel	:	Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Konsep	:	DPRD, Partai politik
Definisi	:	Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat)
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Fraksi
Konsep	:	DPRD, Fraksi DPRD, Partai politik
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Fraksi (PDIP + Hanura, Gerindra, Golkar + Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN)
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama anggota DPRD menurut Komisi
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Partai politik

Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III, IV)
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenis Kelamin
Konsep	:	DPRD, Partai Politik, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut partai dan Jenis Kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN Klasifikasi berdasarkan Jenis kelamin (Laki-Laki, Perempuan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai dan Jenjang Pendidikan
Konsep	:	DPRD, Partai politik, Jenjang pendidikan
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai dan jenjang pendidikan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang

		dikategorikan berdasarkan Partai dan Pendidikan Formal. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN) Klasifikasi berdasarkan Jenjang pendidikan (SLTA, DIII, DIV/S1, S2/S3)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Jenis Kelamin
Konsep	:	DPRD, Komisi DPRD, Jenis Kelamin
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut komisi dan jenis kelamin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang dikategorikan berdasarkan Komisi danJenis Kelamin. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Komisi (I, II, III,IV) Klasifikasi berdasarkan Jenis kelamin (Laki-Laki, Perempuan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Sidang Pleno/Paripurna menurut kategori sidang dan Bulan
Konsep	:	Sidang
Definisi	:	Jumlah Rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan

		wewenang dan tugas yang dilaksanakan setiap bulan. Kategori sidang yaitu Istimewa, Biasa dan Internal
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember) Klasifikasi berdasarkan kategori sidang (Biasa, Internal, Istimewa)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Sidang

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	setiap keputusan ketetapan peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban. Produk hukum yang dimaksud terdiri dari Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum (Surat Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, Peraturan Daerah)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Produk Hukum Daerah DPRD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Dokumen Hukum
Definisi	:	Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinanDPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Jenis Produk Hukum Daerah yang dikatagorikanmenurut kategori Raperda, yaitu raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis produk hukum daerah (Raperda Eksekutif, Raperda Inisiatif, Raperda Daftar Kumulatif Terbuka)

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kepanitiaan
Konsep	:	DPRD
Definisi	:	Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Alat Kelengkapan Daerah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Jenis kepanitiaan (Badan musyawarah, Badan Anggaran)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Usia
Konsep	:	DPRD, Usia/Umur
Definisi	:	Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur adalah anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yangdikategorikan menurut kelompok umur
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Partai (PDIP , Hanura, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, PKB, PAN) Klasifikasi berdasarkan kelompok usia (21-35, 36-49, 50-59, 60+)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

MS-KEG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Survei
Sektor Kegiatan	:	Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	V.22.36.03.001
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	setda@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Analis Kebijakan Muda
Alamat	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	pelpublikorganisasi@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Merupakan kegiatan pada Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mengumpulkan Data Pelayanan Publik. Informasi yang dihimpun meliputi data Kepuasan terhadap Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Tangerang. Data tersebut akan dijadikan materi Publikasi serta Data Evaluasi terutama dalam rangka Optimalisasi pada Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Tangerang
Tujuan Kegiatan	:	Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh

		dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		02 Januari 2024 s.d. 21 Januari 2024
Pengumpulan Data		02 Januari 2024 s.d. 21 Januari 2024
Pengolahan		18 Februari 2024 s.d. 31 Maret 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 31Mei 2024
Diseminasi		01 Juni 2024 s.d. 15 Juni 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Semesteran
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longiudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Mengisi Kuisioner Sendiri
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Web SiKEPO
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah
DESAIN SAMPEL		
Jenis Rancangan Sampel	:	Single stage atau Phase
Metode Pemilihan Sampel	:	Metode Nonprobabilitas
Jenis Metode Sampel		Accidental Sampling
Jumlah Responden		20.907 Responden
PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	SMA/SMK
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		5 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		63 Orang

Melakukan Pelatihan Petugas ? : Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Ya
Penyandian	:	Ya
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	setda@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Analis Kebijakan Muda
Alamat	:	Kantor Bupati Tangerang Jl. H. Somawinata No 1 Tigaraksa
Email	:	pelpublikorganisasi@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya, termasuk pengelolaan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Data sektoral ini mencakup informasi penting seperti jumlah desa dan kelurahan, serta hasil survei kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Tujuan Kegiatan	:	Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan di setiap unit pelayanan di Kabupaten Tangerang. Mengumpulkan dan mengelola data sektoral seperti jumlah desa dan kelurahan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		02 Januari 2024 s.d. 21 Januari 2024
Pengumpulan Data		02 Januari 2024 s.d. 21 Januari 2024
Pengolahan		18 Februari 2024 s.d. 31 Maret 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 31Mei 2024

Diseminasi		01 Juni 2024 s.d. 15 Juni 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Nama kepala daerah Kabupaten Tangerang - Nama organisasi Perangkat Daerah Kab. Tangerang - Batas wilayah administrasi Kab. Tangerang Menurut Kecamatan - Jumlah Peraturan Daerah - Jumlah Peraturan Bupati - Jumlah Tempat Ibadah - Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) - Indeks Reformasi Birokrasi - Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah - Jumlah kelurahan, RT, RW Menurut Kecamatan - Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan Publik

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Semesteran
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longiudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Sekretariat Daerah Kab. Tangerang

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DAERAH

Nama Variabel	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.2 kol (2)
Konsep	:	Bupati

Definisi	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	SK Mendagri No 131.36-5897 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tangerang Provinsi Banten, dan No 132.36-5898 Tahun 2018
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Masa Jabatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.3 kol (2)
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.2.4 kol (2) – (5)
Konsep	:	Wilayah
Definisi	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur,

		Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.5 kol (2)
Konsep	:	Peraturan Daerah
Definisi	:	Jumlah Peraturan Daerah yang terselesaikan
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.6 kol (2)
Konsep	:	Peraturan Bupati
Definisi	:	Jumlah Peraturan Bupati yang terselesaikan
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Keagamaan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.2.7 kol (2) – (14)
Konsep	:	Lembaga keagamaan
Definisi	:	
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nilai Akuntabillitas Pemerintah (AKIP)
Alias	:	Tabel 3.2.8 kol (2) – (5)
Konsep	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi	:	Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kriteria (BB)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Alias	:	Tabel 3.2.9 kol (2) – (5)
Konsep	:	Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Definisi	:	Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kriteria (B, BB)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah
Alias	:	Tabel 3.2.10 kol (3)
Konsep	:	Dokumen kerjasama
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kategori (Dokumen kerjasama daeragm capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Dokumen tatalaksana dan kelembagaan)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelurahan

Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (2)
Konsep	:	Kelurahan
Definisi	:	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah RT
Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (3)
Konsep	:	Rukun Tetangga
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah RW
Alias	:	Tabel 3.2.11 kol (4)
Konsep	:	Rukun Warga
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Pelayanan. Publik
Alias	:	Tabel 3.2.12 kol (3)
Konsep	:	Kepuasan Masyarakat
Definisi	:	Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang mencakup berbagai dimensi sebagai berikut a) persyaratan; b) sistem, mekanisme, dan prosedur; c) waktu penyelesaian; d)biaya/tarif; e) produk spesifikasi jenis pelayanan; f) kompetensi pelaksana; g)perilaku pelaksana; h) sarana dan prasarana dan; i) penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Referensi Pemilihan	:	Indah.bps.go.id
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Kategori penilaian kepuasan (A, B, C)
Aturan Validasi	:	Hanya berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIAT DAERAH

Nama Variabel	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Bupati
Definisi	:	Nama Kepala Daerah/Pemerintah Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Perangkat Daerah
Definisi	:	Nama Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	-
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Konsep	:	Wilayah
Definisi	:	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tangerang Menurut Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan batas wilayah (Timur, Barat, Utara, Selatan)
Ukuran	:	-

Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Peraturan Daerah
Definisi	:	Jumlah Peraturan Daerah yang terselesaikan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Peraturan Bupati
Definisi	:	Jumlah Peraturan Bupati yang terselesaikan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah Lembaga Keagamaan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Lembaga Keagamaan
Definisi	:	
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Lembaga Keagamaan (Masjid, Musholla, Ponpes, majelis taklim, TPQ/TPA/Pura, Gereja Protestan, Gereja Katolik, Vihara, Klenteng/Litang)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Nilai Akuntabillitas Pemerintah (AKIP)
Konsep	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Definisi	:	Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Target, Realisasi, Kriteria
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Konsep	:	Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Definisi	:	Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Target, Realisasi, Kriteria
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Jumlah dokumen kerjasama daerah, jumlah capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan jumlah dokumen tata laksana dan kelembagaan di pemerintah daerah
Konsep	:	Dokumen kerjasama
Definisi	:	

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Kategori (Dokumen kerjasama daeragm capaian penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, Dokumen tatalaksana dan kelembagaan)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Kelurahan
Konsep	:	Kelurahan
Definisi	:	Wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah RT
Konsep	:	Rukun Tetangga
Definisi	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Jumlah RW
Konsep	:	Rukun Warga
Definisi	:	-

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	-

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL INSPEKTORAT

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Inspektorat Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Inspektorat Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Tangerang Inspektorat Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	inspektoratkabtangerang111@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Inspektorat
Alamat	:	Pemerintah Kabupaten Tangerang Inspektorat Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	umpeg.inspektoratkabtangerang@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dimana Walidata Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemeriksaan Dan Publikasi Data Sektoral. Selain Itu Dikarenakan Data-data Sektoral Yang Ada Di Lingkup Kabupaten Tangerang Masih

		Tersebar Dan Belum Terarsipkan Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Ini Diharapkan Data Dapat Dengan Mudah Dicari Dan Ditemukan.
Tujuan Kegiatan	:	Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Mengumpulkan Data Dan Fakta Berupa Aspek Administrasi Pemerintah, Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, Kependudukan, Dan Geografi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Publik Di Kabupaten Tangerang Yang Dihimpun Dari Berbagai Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Informasi Tersebut Dapat Dijadikan Publikasi Sebagai Publikasi Yang Memberikan Kemudahan Bagi Pengguna Data. Selain Itu Juga Dapat Digunakan Sebagai Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Tangerang.
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		01 Februari 2024 s.d. 16 Februari 2024
Pengumpulan Data		19 Februari 2024 s.d. 29 Februari 2024
Pengolahan		23 Februari 2024 s.d. 04 April 2024
Analisis		23 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah - Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik - Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI) - Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) - Gelar Pengawasan bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Capaian MCP Kab. Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Perangkat Daerah)

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		2 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024

Data Mikro : -

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL INSPEKTORAT DAERAH

Nama Variabel	:	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Alias	:	Tabel 3.3.2 kol (2)
Konsep	:	Kapasitas Inspektorat
Definisi	:	Kapasitas APIP dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas
Referensi Pemilihan	:	UU No. 30 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	2020 - 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik
Alias	:	Tabel 3.3.3 kol (2)
Konsep	:	Reformasi Birokrasi
Definisi	:	-
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Alias	:	Tabel 3.3.4 kol (2) – kol (3)
Konsep	:	Manajemen Risiko Indeks
Definisi	:	Aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko.
Referensi Pemilihan	:	PP No. 60 Tahun 2008
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Perencanaan, Kapabilitas
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Alias	:	Tabel 3.3.5 kol (2) – kol (3)
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Definisi	:	Hasil indeks pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Gelar Pengawasan Bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Alias	:	Tabel 3.3.6 kol (2) – kol (6)
Konsep	:	-
Definisi	:	OPD kabupaten tangerang yg tercepat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Perwakilan Prov.Banten
Referensi Pemilihan	:	Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Capaian MCP Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.3.7 kol (3) – kol (5)
Konsep	:	-
Definisi	:	Sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,
Referensi Pemilihan	:	UU No. 30 Tahun 2002
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL INSPEKTORAT

Nama Variabel	:	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Konsep	:	Kapasitas Inspektorat
Definisi	:	Kapasitas APIP dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Jumlah Hasil Penilaian RB Tematik
Konsep	:	Reformasi Birokrasi
Definisi	:	-
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Konsep	:	Manajemen Risiko Indeks
Definisi	:	Aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Hasil Penilaian Baseline Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Definisi	:	Hasil indeks pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Nilai

Nama Variabel	:	Gelar Pengawasan Bagi Perangkat Daerah Tercepat dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Konsep	:	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
Definisi	:	OPD kabupaten tangerang yg tercepat dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Perwakilan Prov.Banten
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Peringkat
Satuan	:	-

Nama Variabel	:	Capaian MCP Kabupaten Tangerang
Konsep	:	-
Definisi	:	Sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENDAPATAN DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Inspektorat Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 1
Email	:	bapenda@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat	:	Pemerintah Kabupaten Tangerang Inspektorat Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	bapenda@tangerangkab.go.id
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dimana Walidata Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemeriksaan Dan Publikasi Data Sektoral. Selain Itu Dikarenakan Data-data Sektoral Yang Ada Di Lingkup Kabupaten Tangerang Masih Tersebar Dan Belum Terarsipkan Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Ini Diharapkan Data Dapat Dengan Mudah Dicari Dan Ditemukan. Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun

2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Metadata Statistik Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Metadata Statistik Kegiatan, Metadata Statistik Variabel, Dan Metadata Statistik Indikator. Metadata Statistik Indikator, Disingkat Dengan Metadata Indikator, Adalah Informasi Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Banyak Pihak Yang Menggunakan Data Statistik. Dalam Penyusunan Metadata Statistik Badan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Tersebut Agar Organisasi, Instansi Lain, Akademisi, Maupun Masyarakat Dapat Memahami Makna Yang Terkandung Dalam Data Yang Disajikan.

Tujuan Kegiatan : Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Mengumpulkan Data Capaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Yang Terdiri Dari Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Tangerang.

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2024 s.d. 16 Januari 2024
Pengumpulan Data	19 Januari 2024 s.d. 29 Februari 2024
Pengolahan	01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis	01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi	01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
- Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten

Tangerang
- Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Dari Aplikasi SIMPAD, PAY ON PRIDE, SICEPOT, WEBR, DAN E-BPHTB
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		0 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		0 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Tidak
Validasi	:	Tidak
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Lainnya: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tangerang

Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah
		DISEMINASI HASIL
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan retribusi daerah adalah jumlah target penerimaan pungutan daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.2 kol (5) – kol (7)
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah adalah jumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau Badan Pendapatan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak daerah adalah jumlah target penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Umum, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.3 kol (5) – kol (7)
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan Umum, Parkir, Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.4 kol (3)
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah target penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kode Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.4 kol (4)
Konsep	:	Pajak Bumi dan Bangunan
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah realisasi penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Kode Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.4.5 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata
Definisi	:	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah Data yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis retribusi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan retribusi daerah adalah jumlah target penerimaan pungutan daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Retribusi Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah adalah jumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau Badan Pendapatan Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah target penerimaan pajak daerah adalah jumlah target penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pajak Daerah
Definisi	:	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi penerimaan kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : Jumlah

Satuan : Rupiah

Nama Variabel : Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi : Jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah target penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : Jumlah

Satuan : Rupiah

Nama Variabel : Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi : Jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah realisasi penerimaan pungutan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan

Klasifikasi Penyajian : -

Ukuran : Jumlah

Satuan : Rupiah

Nama Variabel : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata

Definisi : Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata adalah Data yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Keuangan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Kh. Sarbini No. 3 Tigaraksa – Tangerang
Email	:	bpkadkab.tangerang@yahoo.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Akuntansi
Alamat	:	Jl. Kh. Sarbini No. 3 Tigaraksa – Tangerang
Email	:	bpkadkab.tangerang@yahoo.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pada Pasal 20 Ayat 2, Bidang Akuntansi Mempunyai Uraian Fungsi Sebagai Berikut: A.

Penyiapan Rumusan Kebijakan Teknis Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; B. Penyusunan Rencana Dan Program Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; C. Penyelenggaraan Akuntansi Kas Dan Selain Kas Lingkup Pemerintah Daerah; D. Penyiapan Pengendalian Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi, Dan Pembinaan Akuntansi; E. Penyiapan Bimbingan Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi; Dan Pengelolaan Administrasi Yang Terkait Dengan Penerapan Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Dan Pembinaan Akuntansi

Tujuan Kegiatan : Terciptanya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Handal Dan Dapat Dipercaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance).

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2024 s.d. 16 Januari 2024
Pengumpulan Data	19 Januari 2024 s.d. 29 Februari 2024
Pengolahan	01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis	01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi	01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Realisasi penerimaan daerah kabupaten Tangerang
- Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
- Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten

Tangerang
- Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
- Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
- Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
- Persentase belanja Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
- Persentase belanja Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
- Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Dari Aplikasi SIMPAD, PAY ON PRIDE, SICEPOT, WEBR, DAN E-BPHTB
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		0 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		0 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Tidak
Validasi	:	Tidak
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Lainnya: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah
DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Penerimaan Daerah

Definisi	:	Realisasi Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atas oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis penerimaan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Belanja Daerah
Definisi	:	Semua realisasi pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis pengeluaran (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten

		Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.4 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Pembiayaan Daerah
Definisi	:	Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan)
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.5 kol (2)
Konsep	:	SILPA
Definisi	:	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2019 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.5 kol (3)
Konsep	:	APBD
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2019 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.6 kol (2)
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Pendidikan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2019 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.7 kol (2)
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Kesehatan
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	2019 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.5.9 kol (3)
Konsep	:	Investasi
Definisi	:	Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Referensi Pemilihan	:	PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama Indikator	:	Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total SILPA / Total APBD x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja pendidikan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Pendidikan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total jumlah belanja bidang urusan pendidikan / Total APBD x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-

Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

Nama Indikator	:	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja kesehatan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Kesehatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Total jumlah belanja bidang urusan pendidikan / Total APBD x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Publik

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Penerimaan Daerah
Definisi	:	Realisasi Penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atas oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Daerah
Definisi	:	Semua realisasi pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pembiayaan Daerah
Definisi	:	Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah SILPA Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA

Definisi	:	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	APBD
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	SILPA, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Pendidikan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan Pendidikan
Klasifikasi Penyajian	:	-

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja pendidikan, APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Pendidikan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Kesehatan
Definisi	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pemenuhan urusan kesehatan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Belanja Kesehatan , APBD
Definisi	:	Rasio jumlah rencana keuangan tahunan untuk pemenuhan urusan Kesehatan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah investasi BUMD Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Investasi
Definisi	:	Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Ketenagakerjaan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jalan Pemda Tigaraksa, Bojong, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710
Email	:	bkpsdm@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
Alamat	:	Jalan Pemda Tigaraksa, Bojong, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Email	:	bkpsdm@tangerangkab.go.id

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Diamana Produsen Data Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan Pemeriksaan Yang Akan Di Serahkan Kepada Wali Data
Tujuan Kegiatan	:	-
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang - Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang - Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang - Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang - Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang - Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang - Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut

Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang
- Jumlah PPPK Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin pada Unit Kerja di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN)
Unit Pengumpulan Data	:	Individu

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		0 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		0 Orang

Melakukan Pelatihan Petugas ? : Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Ya
Penyandian	:	Ya
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu

Tingkat Penyajian Data : Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.2 kol (2) – kol (10)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif di Kabupaten Tangerang

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.3 kol (2) – kol (8)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.4 kol (2) – kol (61)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin di Kabupaten Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal

tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.5 kol (2) – kol (19)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Alias	:	Tabel 3.6.6 kol (2) – kol (49)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Umur, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.7 kol (2) – kol (35)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kelompok Umur, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.8 kol (2) – kol (91)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Kepangkatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Kepangkatan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.9 kol (2) – kol (17)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Golongan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seseorang berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data

Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.10 kol (2) – kol (31)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Jabatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.11 kol (2) – kol (5)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Jabatan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.

Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.12 kol (2) – kol (25)
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama/Kepercayaan yang dianut dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.6.13 kol (2) – kol (17)
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Agama, Jenis Kelamin

Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut Agama/Kepercayaan yang dianut dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 20 Tahun 2023 Ttg Aparatur Sipil Negara,PERATURAN-BKN-NOMOR-7-TAHUN-2023-TTG-SIASN, Perbup-Tangerang-88-2021-Pedoman-Satu-Data
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin di Kabupaten Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan : - SD - SLTP - SLTA - D-I - D-II - D-III - D-IV - S1 - S2 - S3
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut tingkat Pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang Tangerang yang menamatkan suatu tingkat Pendidikan formal tertentu dan telah diketahui oleh BKPSDM
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan : - SMA - D-III/Akta III - D-IV/Akta IV - S1 - S2
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Umur, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Kelompok Umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur : - 21 – 25 Tahun - 26 – 30 Tahun - 31 – 35 Tahun - 36 – 40 Tahun - 41 – 45 Tahun - 46 – 50 Tahun - 51 – 55 Tahun - 56 – 60 Tahun - >60 Tahun

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kelompok Umur, Jenis Kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur : - 21 – 25 Tahun - 26 – 30 Tahun - 31 – 35 Tahun - 36 – 40 Tahun - 41 – 45 Tahun - 46 – 50 Tahun - 51 – 55 Tahun - 56 – 60 Tahun - >60 Tahun
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Tingkat Kepangkatan, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Tingkat Kepangkatan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten

Tangerang
Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :
- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kepangkatan :
- I/a
- I/b
- I/c
- I/d
- II/a
- II/b
- II/c
- II/d
- III/a
- III/b
- III/c
- III/d
- IV/a
- IV/b
- IV/c
- IV/d
- IV/e

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja aktif menurut Golongan dan jenis kelamin yang merupakan sebuah tingkatan atau kedudukan seseorang berdasarkan jabatan dalam rangkaian sistem kepegawaian sebagai dasar untuk penggajian di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :
- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kepangkatan :
- II/a
- II/c

- III/a
- III/b

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan, Jenis kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Jabatan terdiri dari jabatan struktural dan fungsional di Kabupaten Tangerang.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Jabatan :

- Fungsional tertentu
- Fungsional umum/Staff
- Eselon IV
- Eselon III
- Eselon II

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah PPPK Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Golongan, Jenis Kelamin

Definisi : Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian aktif Menurut Jabatan dan jenis kelamin yaitu jabatan fungsional di Kabupaten Tangerang.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Klasifikasi berdasarkan Jabatan :

- Fungsional tertentu

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama yang dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Agama : - Islam - Katholik - Protestan - Buddha - Hindu - Lainnya
Aturan Validasi	:	Jumlah
Akses Publikasi	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah PPPK Menurut Agama yang Dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pegawai Negeri Sipil, Agama, Jenis kelamin
Definisi	:	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil aktif Menurut Agama yang dianut dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-Laki - Perempuan Klasifikasi berdasarkan Agama : - Islam - Katholik - Protestan - Buddha - Hindu

- Lainnya

Aturan Validasi : Jumlah

Akses Publikasi : Orang

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl.kh. Somawinata No.1 Kel.kadu Agung Kec.tigaraksa Kab.tangerang
Email	:	kabtangerangbappeda@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	:	sundalaporbappeda@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Penyusunan Kompilasi Statistik Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan Masukan Penting Dalam Rangka Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Di Kabupaten

		Tangerang Secara Terpadu, Yakni Menjadi Sarana Teknis Dalam Melaksanakan Program Pembangunan, Antara Lain Untuk Menilai Gambaran Fisik Dan Sifat Sifatnya Serta Untuk Menilai Tingkat Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Alam, Masalah Lingkungan. Selain Itu Juga Dapat Digunakan Untuk Menilai Gambaran Potensi Alam, Manusia, Dan Hasil Kegiatannya, Menilai Keberhasilan Pembangunan Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Untuk Menilai Potensi Daerah Dan Kemungkinan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Atau Dengan Kata Lain Sebagai Sarana Publikasi Hasil Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Dan Potensi Yang Masih Dapat Dikembangkan Di Kabupaten Tangerang.
Tujuan Kegiatan	:	Mengidentifikasi Potensi Daerah, Serta Karakteristik Kabupaten Tangerang.
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam PERDA - Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan - Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Kompromin
Unit Pengumpulan Data	:	-

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu

Tingkat Penyajian Data	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Variabel	:	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam PERDA
Alias	:	Tabel 3.7.2 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	RPMJD, Perda
Definisi	:	Program-program yang ada dalam RPJMD harus ada dalam RKPD
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2019 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Alias	:	Tabel 3.7.3 kol (2) – kol (4)
Konsep	:	Penelitian pengembangan
Definisi	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2022 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen : - Dokumen penelitian bidang pemerintahan - Dokumen penelitian bidang sosial kemasyarakatan

- Dokumen penelitian bidang infrastruktur
- Dokumen penelitian bidang ekonomi

Aturan Validasi : Harus berisi angka

Akses Publikasi : Terbuka

Nama Variabel : Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang

Alias : Tabel 3.7.4 kol (2) – kol (4)

Konsep : Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian

Definisi : Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian

Referensi Pemilihan : -

Referensi Waktu : 2022 – 2023

Tipe Data : *Integer*

Klasifikasi Isian : Klasifikasi berdasarkan jenis dokumen :
- Dokumen Perencanaan
- Dokumen data pembangunan
- Dokumen pengendalian

Aturan Validasi : Harus berisi angka

Akses Publikasi : Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Variabel : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam PERDA Kabupaten Tangerang

Konsep : RPMJD, Perda

Definisi : Program-program yang ada dalam RPJMD harus ada dalam RKPD

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan jenis program :
- RPJMD yang harus dilaksanakan
- APBD yang harus dilaksanakan
- RKPD

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Program

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Konsep	:	Penelitian pengembangan
Definisi	:	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

Nama Variabel	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Pembangunan, Data Pengendalian di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Definisi	:	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengendalian
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokumen

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pendidikan Dan Pelatihan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Jl. M. Atik Soewardi, Kadu Agung, Tigaraksa
Email	:	kesbangpolkabtng@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Alamat	:	Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Jl. M. Atik Soewardi, Kadu Agung, Tigaraksa
Email	:	kesbangpolkabtng@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	-
Tujuan Kegiatan	:	-
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan - Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan - Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik - Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik - Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah menurut Partai Politik - Nama LSM, Ormas yang terdaftar - Pembinaan LSM dan ORMAS
DESAIN KEGIATAN		

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		0 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		0 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024

Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Variabel	:	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Alias	:	Tabel 3.18.2
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah kegiatan dan jenis kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Alias	:	Tabel 3.18.2
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.3
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya Kegiatan pembinaan dan pendidikan politik menurut partai politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.3
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Referensi Pemilihan	:	Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah menurut Partai Politik
Alias	:	Tabel 3.18.4
Konsep	:	Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah
Definisi	:	Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Nama LSM, Ormas yang terdaftar
Alias	:	Tabel 3.18.5
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Nama-nama LSM dan ORMAS merupakan nama yang terdaftar di Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. Nama-nama LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*String*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Pembinaan LSM dan ORMAS
Alias	:	Tabel 3.18.6
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS merupakan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Referensi Pemilihan	:	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Variabel	:	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah kegiatan dan jenis kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh

Bakesbangpol

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Jumlah peserta kegiatan pembinaan politik daerah menurut Jenis Kegiatan
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan jenis kegiatan pembinaan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan politik daerah
Definisi	:	Banyaknya Kegiatan pembinaan dan pendidikan politik menurut partai politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Menurut Partai Politik
Konsep	:	Peserta Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Definisi	:	Banyaknya jumlah peserta hadir pada kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah

menurut Partai Politik

Konsep	:	Bantuan Keuangan Pada Politik Daerah
Definisi	:	Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. Partai politik yang dimaksud adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan partai politik
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Pembinaan LSM dan ORMAS
Konsep	:	LSM dan ORMAS
Definisi	:	Pembinaan terhadap LSM dan ORMAS merupakan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dan dilaksanakannya setiap tahunnya. LSM dan ORMAS yang dimaksud adalah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Bakesbangpol.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

		Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jalan raya Curug Km.2 Curug Tangerang
Email	:	bpbd.kabtng@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Alamat	:	Jalan raya Curug Km.2 Curug Tangerang
Email	:	bpbd.kabtng@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	-
Tujuan Kegiatan	:	-
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya - Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya - Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin - Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap - Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi

Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

- Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
- Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
- Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
- Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
- Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu
- Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencan
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Menurut Jenis, Kondisi dan Pos Pemadam
- Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
- Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
- Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
- Jumlah Relawan Bencana
- Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
- Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
- Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		3 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		10 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.2 dan 3.15.3
Konsep	:	Bencana Alam
Definisi	:	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.4 dan 3.15.5
Konsep	:	Bencana Non Alam
Definisi	:	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.15.6
Konsep	:	Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam
Definisi	:	Korban manusia adalah orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Alias	:	Tabel 3.15.9
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Korban yang seharusnya di prioritaskan di evakuasi tanggap darurat lengkap
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Alias	:	Tabel 3.15.9
Konsep	:	Korban bencana

Definisi	:	Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
Alias	:	Tabel 3.15.10 dan 3.15.11
Konsep	:	Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam
Definisi	:	Jumlah Rumah Rusak adalah banyaknya rumah rusak yang diakibatkan oleh bencana alam
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Alias	:	Tabel 3.15.12
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Definisi	:	Wilayah Menajemen Kebakaran (WMK) adalah sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran sehingga kerugian berupa material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan
Referensi Pemilihan	:	UU No. 28 Thn 2002
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Alias	:	Tabel 3.15.12
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Definisi	:	Jumlah umlah kejadian wilayah menegament minimal 15 menit Sesuai dengan Pencapaian Setandar Pelayanan Minimum (SPM). Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Referensi Pemilihan	:	UU No. 28 Thn 2002
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.15.13
Konsep	:	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Definisi	:	Jumlah kendaraan oprasional pemadam kebakaran dan jenisnya yang terdiri dari 12 pos dan berbagaimacam jenisnya diantara lain kendaraan bermotor dan kendaraan mobil pemadam atau yang di sebut sebagai fire truck
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Alias	:	Tabel 3.15.14
Konsep	:	Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Definisi	:	Retribusi alat proteksi kebakaran adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Referensi Pemilihan	:	UU 28 Tahun 2009
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	- Target Pendapatan - Realisasi Pendapatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu
Alias	:	Tabel 3.15.15
Konsep	:	Personil ASN dan Non ASN

Definisi	:	Personil ASN dan Non ASN di 12 Pos Pemadam Kebakaran Tersebar di masing masing Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan umpeg No.26 thn 2020
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan Pos Pembantu
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.17 dan 3.15.18
Konsep	:	Kawasan Rawan Bencana
Definisi	:	Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam
Referensi Pemilihan	:	UU No.21 2008
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Menurut Jenis, Kondisi dan Pos Pemadam
Alias	:	Tabel 3.15.19
Konsep	:	Mobil Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Mobil pemadam adalah perlengkapan yang vital bagi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas melakukan pemadaman kebakaran.

- Foam Tender Truck. Mobil pemadam kebakaran ini khusus untuk menyemprotkan busa atau foam.
- Pump Truck. Truck pemadam ini dikhususkan untuk membawa pompa sekaligus mengambil air yang ada di lokasi kebakaran.
- Turntable Tender And Snorkle.

Referensi Pemilihan	:	UU No.22 Thn 2009
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Alias	:	Tabel 3.15.19
Konsep	:	Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Pos Pemadam kebakaran adalah salah satu bentuk tempat masyarakat untuk melaporkan bencana kebarakan yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan kerugian yang banyak
Referensi Pemilihan	:	UU No.23 Thn 2014
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Alias	:	Tabel 3.15.20
Konsep	:	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Definisi	:	Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan
Referensi Pemilihan	:	Perka BNPB No.1 Thn 2012
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
Alias	:	Tabel 3.15.21
Konsep	:	Sistem Peringatan Dini
Definisi	:	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan BNPB NO.4 thn 2022
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Relawan Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.22
Konsep	:	Relawan Bencana
Definisi	:	Relawan Penanggulangan Bencana merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.22
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan Bencana
Definisi	:	Pembinaan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Alias	:	Tabel 3.15.23
Konsep	:	Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Definisi	:	Pembinaan Satuan Pendidikan sekolah tentang bencana
Referensi Pemilihan	:	UU No. 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana
Alias	:	Tabel 3.15.24
Konsep	:	Potensi Luas Bahaya
Definisi	:	Potensi Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Mustahil untuk mengetahui semua bahaya yang ada
Referensi Pemilihan	:	UU No.29 Thn 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Alam Menurut Jenisnya
Konsep	:	Bencana Alam
Definisi	:	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bencana

Nama Variabel	:	Jumlah Bencana Non Alam Menurut Jenisnya
Konsep	:	Bencana Non Alam
Definisi	:	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bencana

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam, Kelompok Usia, Dan Jenis Kelamin
Konsep	:	Korban Manusia Yang Terdampak Bencana Alam
Definisi	:	Korban manusia adalah orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan, jenis bencana alam, kelompok usia, dan jenis kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Seharusnya Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Korban yang seharusnya di prioritaskan di evakuasi tanggap darurat lengkap
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Konsep	:	Korban bencana
Definisi	:	Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Alam
Konsep	:	Rumah Rusak Yang Diakibatkan Bencana Alam
Definisi	:	Jumlah Rumah Rusak adalah banyaknya rumah rusak yang diakibatkan oleh bencana alam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis bencana alam
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Definisi	:	Wilayah Menajemen Kebakaran (WMK) adalah sistem penataan dini dalam rangka mencegah dan

		mengendalikan bahaya kebakaran sehingga kerugian berupa material dan jiwa manusia dapat dicegah atau diminimalkan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Konsep	:	Kasus Kebakaran Di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit
Definisi	:	Jumlah umlah kejadian wilayah menegament minimal 15 menit Sesuai dengan Pencapaian Setandar Pelayanan Minimum (SPM). Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Menurut Jenisnya
Konsep	:	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Jumlah kendaraan oprasional pemadam kebakaran dan jenisnya yang terdiri dari 12 pos dan berbagaimacam jenisnya diantara lain kendaraan bermotor dan kendaraan mobil pemadam atau yang di sebut sebagai fire truck
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis kendaraan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Konsep	:	Retribusi Alat Proteksi Kebakaran
Definisi	:	Retribusi alat proteksi kebakaran adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa

		Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	- Target Pendapatan - Realisasi Pendapatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Personil ASN dan Non ASN Berdasarkan Pos Pembantu
Konsep	:	Personil ASN dan Non ASN
Definisi	:	Personil ASN dan Non ASN di 12 Pos Pemadam Kebakaran Tersebar di masing masing Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan Pos Pembantu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana
Konsep	:	Kawasan Rawan Bencana
Definisi	:	Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kawasan

Nama Variabel	:	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran
Konsep	:	Mobil Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Mobil pemadam adalah perlengkapan yang vital bagi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas melakukan pemadaman kebakaran.

- Foam Tender Truck. Mobil pemadam kebakaran ini khusus untuk menyemprotkan busa atau foam.
- Pump Truck. Truck pemadam ini dikhususkan untuk membawa pompa sekaligus mengambil air yang ada di lokasi kebakaran.

Turntable Tender And Snorkle.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Konsep	:	Pos Pembantu Pemadam Kebakaran
Definisi	:	Pos Pemadam kebakaran adalah salah satu bentuk tempat masyarakat untuk melaporkan bencana kebarakan yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan kerugian yang banyak
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pos

Nama Variabel	:	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk
Konsep	:	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Definisi	:	Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pos

Nama Variabel	:	Jumlah Sistem Peringatan Dini Yang Sudah Terintegrasi
Konsep	:	Sistem Peringatan Dini
Definisi	:	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Sistem

Nama Variabel	:	Jumlah Relawan Bencana
Konsep	:	Relawan Bencana
Definisi	:	Relawan Penanggulangan Bencana merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bencana
Konsep	:	Kegiatan Pembinaan Bencana
Definisi	:	Pembinaan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Jumlah Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Konsep	:	Pembinaan BPBD Pada Satuan Pendidikan
Definisi	:	Pembinaan Satuan Pendidikan sekolah tentang bencana
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kegiatan

Nama Variabel	:	Potensi Luas Bahaya Menurut Jenis Bencana
Konsep	:	Potensi Luas Bahaya
Definisi	:	Potensi Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Mustahil untuk mengetahui semua bahaya yang ada
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Luas

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PENDIDIKAN

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Pendidikan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	:	perencanaandisdik.kabtangerang@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Somawinata Blok D. No. 1 Tigaraksa
Email	:	perencanaandisdik.kabtangerang@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Merupakan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang menyajikan keadaan umum non Pendidikan dan Pendidikan anak usia dini , Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Kesetaraan. Keadaan umum non Pendidikan menyajikan informasi meliputi administrasi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan serta aspek geografi, Demografi, Sosial Budaya,

Agama, Insfrastruktur dan ekonomi. Informasi yang dihimpun meliputi data-data sektoral Perangkat Daerah dan Sebagian data-data Statistik Dasar yang bersumber dari DAPODIK Kementrian Pendidikan. Data tersebut akan dijadikan materi publikasi serta data evaluasi terutama dalam rangka perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Tujuan Kegiatan : Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Buku Profil Pendidikan sehingga dpat diketahui gambaran umum non Pendidikan dan Pendidikan di masing-masing jenjang lingkup dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Non Pendidikan ini meliputi informasi administrasi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan serta aspek geografi, Demografi, Sosial Budaya, Agama, Insfrastruktur dan ekonomi. di Kabupaten Tangerang yang dihimpun dari data data sektoral Perangkat Daerah dan Sebagian data – data Statistik Dasar yang bersumber dari DAPODIK Kementrian Pendidikan.
Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai publikasi yang memberikan kemudahan bagi pengguna data. Selain itu juga digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data	03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan	01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis	01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi	01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Jumlah murid menurut kelompok usia dan jenis kelamin di kabupaten Tangerang
- Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang

- Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kelulusan Tingkat SD menurut Status Sekolah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP

Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Lainnya : Kompromin
Unit Pengumpulan Data	:	-

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	

Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Individu

Tingkat Penyajian Data : Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PENDIDIKAN

Nama Variabel	:	Jumlah Murid Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.2 kol (3) – kol (8)
Konsep	:	Murid, Kelompok Usia, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dengan

		peserta didik berusia 3 sampai dengan 18 tahun
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
Alias	:	Tabel 3.8.3 kol (3) – kol (20)
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.4 kol (3) – kol (10)
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan yang diluar usia 4-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.5 kol (11) – kol (14)
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah jenjang PAUD yang memiliki kondisi bangunan baik dan rusak yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.6 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah, Guru
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan Non PNS pada pendidikan jenjang PAUD dengan tingkat pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan yang belum memiliki ijazah S1
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.7 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah Siswa TK Menurut status sekolah dan jenis kelamin dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.8 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah sekolah TK Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.9 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Guru, Taman Kanak-Kanak, Sertifikat
Definisi	:	Jumlah Guru TK Menurut kepemilikan sertifikat, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.10 kol (3) – kol (8)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah SD Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.11 kol (3) – kol (26)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berusia 7 sampai dengan 12 tahun dan di luar usia 7-12 tahun dan menurut status sekolah dan jenis kelamin
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.12 kol (3) – kol (12)
Konsep	:	Guru, Sekolah Dasar, Status sekolah, Ijazah
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan non PNS pada pendidikan jenjang SD yang memiliki ijazah pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan belum memiliki ijazah pendidikan S1 Menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelulusan Tingkat SD menurut Status Sekolah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.13 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Data jumlah siswa lulus sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD berdasarkan status sekolah dalam suatu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.14 kol (3) – kol (8)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Jumlah sekolah jenjang SMP dan ruang kelas SMP yang memiliki kondisi bangunan baik dan bangunan rusak dengan tingkat kerusakan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dilihat status sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah kecamatan

Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.15 kol (3) – kol (26)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berusia 13 sampai dengan 15 tahun dan di luar usia 13 -15 tahun menurut status sekolah dan jenis kelamin
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.16 kol (3) – kol (31)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan

		Tingkat kelas menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.17 kol (3) – kol (19)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan Tingkat kelas menurut status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.18 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022

Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.19 kol (3) – kol (6)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.8.20 kol (3) – kol (7)
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Peserta Didik Baru Jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas 7 yang dilihat berdasarkan Status Sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah Kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021 – 2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PENDIDIKAN

Nama Variabel	:	Jumlah Murid Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Murid, Kelompok Usia, Jenis kelamin
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dengan peserta didik berusia 3 sampai dengan 18 tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan kelompok usia : - 3 – 6 Tahun - 7 – 12 Tahun - 13 – 15 Tahun - 16 – 18 Tahun
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Warga Negara Usia 3- 6 Tahun di Kabupaten Tangerang yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Definisi	:	Jumlah anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :

- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Usia
- 3 Tahun
- 4 Tahun
- 5 Tahun
- 6 Tahun

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Siswa Usia Paud Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendidikan Anak Usia Dini

Definisi : Jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan yang diluar usia 4-6 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Usia
- 4 – 6 Tahun
- Di luar 4 – 6 Tahun

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Sekolah Paud Menurut Kondisi, Status Sekolah,dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah

Definisi : Jumlah sekolah jenjang PAUD yang memiliki kondisi bangunan baik dan rusak yang dapat dimanfaatkan

untuk proses belajar mengajar

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah : - Bangunan baik - Bangunan rusak
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Bangunan

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Paud Menurut Kepemilikan Ijazah Guru, Status Sekolah, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pendidikan Anak Usia Dini, Status sekolah, Guru
Definisi	:	Pendidik profesional yang berstatus PNS dan Non PNS pada pendidikan jenjang PAUD dengan tingkat pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan yang belum memiliki ijazah S1
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Guru : - PNS - Non PNS Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan ijazah guru : - Pendidikan S1/D-IV/S2/S3 - Belum memiliki ijazah S1
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa TK Menurut Status Sekolah, Jenis Kelamin, Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah Siswa TK Menurut status sekolah dan jenis kelamin dalam suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin - Laki-Laki - Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Sekolah TK dan Ruang Kelas Sekolah TK Menurut Kondisi, Status Sekolah Dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Siswa, Taman Kanak-Kanak, Status sekolah, Jenis kelamin
Definisi	:	Jumlah sekolah TK Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit Kelas

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah TK Menurut Kepemilikan Sertifikat, Status Sekolah, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Guru, Taman Kanak-Kanak, Sertifikat
Definisi	:	Jumlah Guru TK Menurut kepemilikan sertifikat, status sekolah dalam suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan sertifikat :

- Bersertifikat
- Tidak memiliki sertifikat

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Sekolah SD dan Ruang Kelas SD Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Dasar, Status sekolah

Definisi : Jumlah sekolah SD Menurut ruang kelas, kondisi bangunan baik dan rusak, status sekolah dalam suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah :
- Bangunan baik
- Bangunan rusak

Ukuran : Jumlah

Satuan : Unit Kelas

Nama Variabel : Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin

Definisi : Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berusia 7 sampai dengan 12 tahun dan di luar usia 7-12 tahun dan menurut status sekolah dan jenis kelamin

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Kelompok Umur :
- Usia 7 – 12 Tahun

- Di luar usia 7 – 12 Tahun

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Pendidik SD Berdasarkan Status Tenaga Pendidik, Status Sekolah, Kepemilikan Ijazah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Guru, Sekolah Dasar, Status sekolah, Ijazah

Definisi : Pendidik profesional yang berstatus PNS dan non PNS pada pendidikan jenjang SD yang memiliki ijazah pendidikan S1/D-IV/S2/S3 dan belum memiliki ijazah pendidikan S1 Menurut status sekolah

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :

- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Status Guru :

- PNS
- Non PNS

Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan Ijazah :

- Pendidikan SI/DIV/S2/S3
- Belum Memiliki Ijazah S1

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Kelulusan Tingkat SD menurut Status Sekolah dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Dasar, Status sekolah

Definisi : Data jumlah siswa lulus sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD berdasarkan status sekolah dalam suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :

- Negeri

- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Status Lulus :

- Lulus
- Tidak Lulus

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah SMP dan Ruang Kelas SMP Menurut Status Sekolah, Kondisi Bangunan, dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah

Definisi : Jumlah sekolah jenjang SMP dan ruang kelas SMP yang memiliki kondisi bangunan baik dan bangunan rusak dengan tingkat kerusakan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dilihat status sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah kecamatan

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :

- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Kondisi sekolah :

- Bangunan baik
- Bangunan rusak

Ukuran : Jumlah

Satuan : Bangunan

Nama Variabel : Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah, Jenis kelamin

Definisi : Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berusia 13 sampai dengan 15 tahun dan di luar usia 13 -15 tahun menurut status sekolah dan jenis kelamin

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan kelompok umur :
- Usia 13 – 15 Tahun
- Di luar usia 13 – 15 Tahun

Klasifikasi berdasarkan Jenis Kelamin :
- Laki-Laki
- Perempuan

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Siswa SD Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Dasar, Status sekolah, Jenis kelamin

Definisi : Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan Tingkat kelas menurut status sekolah

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang

Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah :
- Negeri
- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Tingkatan kelas :
- Kelas I
- Kelas II
- Kelas III
- Kelas IV
- Kelas V
- Kelas VI

Ukuran : Jumlah

Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Kelas Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Konsep : Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah

Definisi : Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan Tingkat kelas menurut status sekolah

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Tingkatan kelas : - Kelas I - Kelas II - Kelas III
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SD Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Sekolah Dasar, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta Klasifikasi berdasarkan Status lulus : - Lulus - Tidak lulus
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa SMP Menurut Status Sekolah, Status Kelulusan, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Menengah Pertama dengan peserta didik berdasarkan status kelulusan dan status sekolah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri

- Swasta

Klasifikasi berdasarkan Status lulus :

- Lulus
- Tidak lulus

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Siswa Baru SMP Menurut Status Sekolah dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Sekolah Menengah Pertama, Status sekolah
Definisi	:	Peserta Didik Baru Jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) Kelas 7 yang dilihat berdasarkan Status Sekolah (Negeri/Swasta) dan wilayah Kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kode wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang Klasifikasi berdasarkan Status Sekolah : - Negeri - Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

MS-KEG KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Kesehatan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Kesehatan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	K-002.2021

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Abdul Hamid
Email	:	officialdinkestangerangkab@gmail.com

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Dr. Radianti Bulan M. Tobing
Alamat	:	Komplek Perkantoran Tigaraksa, Jl. H. Abdul Hamid No.rt.2, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	officialdinkestangerangkab@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Mengkompilasi Dan Memvalidasi Serta Melengkapi Data-data Program Dan Kegiatan Di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Yang Selanjutnya Disajikan Sebagai Produk Publikasi Untuk Memenuhi Keterbukaan Informasi Publik Dinas Kesehatan Dalam Bentuk Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang.
Tujuan Kegiatan	:	Disusunnya Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2023. Dimaksudkan Agar Pembaca Dapat Memperoleh Informasi Dan Data Yang Dibutuhkan Khususnya Mengenai Derajat Kesehatan Serta Capaian Kinerja Masing-masing Program Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Tangerang.

Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		01 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023
Pengumpulan Data		01 Februari 2024 s.d. 10 Februari 2024
Pengolahan		11 Februari 2024 s.d. 28 Februari 2024
Analisis		01 Maret 2024 s.d. 10 Maret 2024
Diseminasi		15 Maret 2024 s.d. 20 Maret 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Rumah Sakit Menurut Klasifikasinya dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Menurut Kepemilikannya dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kunjungan Pasien Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kunjungan Pasien Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Menurut Jenisnya, Jenis Kelamin, dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Garda) Level 1 di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tempat Tidur Pada Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pasien Keluar Mati >48 jam Menurut Rumah Sakit Di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Gross Death Rate Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Net Death Rate Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Perawatan, Jumlah Hari Dirawat, BOR, BTO, TOI, ALOS Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
- Jumlah Posyandu Pratama, Jumlah Posyandu Madya, Jumlah Posyandu Mandiri, Jumlah Posyandu Aktif, dan Jumlah Posbindu PTM Menurut Puskesmas dan Kecamatan di

Kabupaten Tangerang

- Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis Gigi Menurut Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Perawat dan Bidan di Puskesmas Kabupaten Tangerang
- Jumlah Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi di Puskesmas Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang
- Jumlah Ahli Labroratorium Medik, Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, Keterapian Fisik, dan Keteknisan Medis di Puskesmas Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker di Puskesmas Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tangerang
- Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan dan Tenaga Kesehatan Ketrampilan Tradisional Menurut puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan di Kabupaten Tangerang
- Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kecamatan Dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Alokasi Anggaran Kesehatan Menurut Sumber Biaya di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan, Dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Status Gizi Balita menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Status Gizi Balita menurut Indeks TB/U Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Status Gizi Balita menurut Indeks BB/TB Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Balita Kurus yang Mendapat Makanan

Tambahan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping Asi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Estimasi Dan Penderita Hipertensi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Penderita Diabetes Melitus(DM) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (SADANIS) Menurut, Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	- Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI) - Computer Aided Web Interviewing (CAWI)
Unit Pengumpulan Data	:	- Individu - Lainnya : Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik, Apotek

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV Atau S1 Atau S2 Atau S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		3 Orang

Melakukan Pelatihan Petugas ? : Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Ya
Penyandian	:	Ya
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	- Individu - Lainnya: Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik, Apotek
Tingkat Penyajian Data	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Tidak
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	15 Maret 2024
Digital	:	15 Maret 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel : Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus menurut kecamatan

Alias : Tabel 3.9.2

Konsep	:	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus
Definisi	:	Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya menurut jenisnya
Alias	:	Tabel 3.9.2
Konsep	:	Sarana Pelayanan Kesehatan, Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan
Definisi	:	Sarana Pelayanan Kesehatan selain Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut jenisnya
Alias	:	Tabel 3.9.2

Konsep	:	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA), Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOt/UMOT), Produksi Alat Kesehatan, Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan (Alkes)
Definisi	:	Pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Menurut tipe rumah sakit dan Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.9.3
Konsep	:	Rumah Sakit Umum Daerah
Definisi	:	Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Khusus menurut Klasifikasinya dan kecamatan

Alias	:	Tabel 3.9.4 kolom 3-4
Konsep	:	Rumah Sakit Khusus
Definisi	:	Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah puskesmas menurut jenisnya dan kecamatan
Alias	:	Tabel 3.9.5
Konsep	:	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Non Rawat Inap
Definisi	:	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya
Referensi Pemilihan	:	Permenkes No. 43 Tahun 2019
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifkasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.6 kolom 3-5, 12-14, 21-23

Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. Kunjungan rawat jalan puskesmas termasuk kunjungan ke jaringan puskesmas, dalam gedung maupun luar gedung (puskesmas keliling, puskemas pembantu, bidan desa, pemeriksaan anak sekolah, dsb).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.6 kolom 6-8, 15-17, 24-26
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)

Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.6 kolom 9-11, 18-20, 27-29
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan menurut Rumah Sakit
Alias	:	Tabel 3.9.7 kolom 3-5, 12-14, 21-23
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap menurut Rumah Sakit
Alias	:	Tabel 3.9.7 kolom 6-8, 15-17, 24-26
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan pasien baru gangguan jiwa menurut rumah sakit
Alias	:	Tabel 3.9.7 kolom 9-11, 18-20, 27-29
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan)
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
Alias	:	Tabel 3.9.8
Konsep	:	Rumah Sakit, Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1
Definisi	:	Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Jenis Rumah Sakit, yakn Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah tempat tidur menurut Rumah Sakit
Alias	:	Tabel 3.9.9
Konsep	:	Tempat Tidur Rumah Sakit
Definisi	:	Tempat tidur yang berada di ruang rawat inap dan ruang pasca persalinan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.9.10
Konsep	:	Pasien Keluar Hidup, Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Seluruh Pasien yang keluar dalam keadaan hidup dan keluar mati setelah kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam dirawat.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.9.11
Konsep	:	Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat kurang dari 48 jam
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati > 48 jam dirawat menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.9.12

Konsep	:	Pasien Keluar Mati Lebih dari 48 jam dirawat
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat lebih dari 48 jam
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Hari Perawatan menurut Rumah Sakit
Alias	:	Tabel 3.9.15 Kolom 3, 9, 15
Konsep	:	Hari Perawatan
Definisi	:	Total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama satu tahun
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lama dirawat menurut Rumah Sakit
Alias	:	Tabel 3.9.15 Kolom 4,10,16
Konsep	:	Lama Dirawat
Definisi	:	Total lama dirawat dari pasien sejak masuk sampai pulang, selama satu tahun
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Alias	:	Tabel 3.9.16
Konsep	:	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Definisi	:	Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	String
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi karakter
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Pratama
Alias	:	Tabel 3.9.17 Kolom 4, Tabel 3.9.18 Kolom 4, Tabel 3.9.19 Kolom 4
Konsep	:	Posyandu Pratama
Definisi	:	Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang

dari 5 (lima) orang

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Madya
Alias	:	Tabel 3.9.17 Kolom 5, Tabel 3.9.18 Kolom 5, Tabel 3.9.19 Kolom 5
Konsep	:	Posyandu Madya
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Purnama
Alias	:	Tabel 3.9.17 Kolom 6, Tabel 3.9.18 Kolom 6, Tabel 3.9.19 Kolom 6
Konsep	:	Posyandu Purnama
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang

		atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Mandiri
Alias	:	Tabel 3.9.17 Kolom 7, Tabel 3.9.18 Kolom 7, Tabel 3.9.19 Kolom 7
Konsep	:	Posyandu Mandiri
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Posbindu PTM**
Alias	:	Tabel 3.9.17 Kolom 9, Tabel 3.9.18 Kolom 9, Tabel 3.9.19 Kolom 9
Konsep	:	Posbindu PTM
Definisi	:	Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Umum menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.20 Kolom 13-15, Tabel 3.9.21 Kolom 12-14, Tabel 3.9.22 Kolom 12-14, Tabel 3.9.23 Kolom 12-14, Tabel 3.9.24 Kolom 12-14, Tabel 3.9.25 Kolom 12-14
Konsep	:	Dokter Gigi
Definisi	:	Dokter Gigi adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit

Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Spesialis menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.20 Kolom 16-18, Tabel 3.9.21 Kolom 15-17, Tabel 3.9.22 Kolom 15-17, Tabel 3.9.23 Kolom 15-17, Tabel 3.9.24 Kolom 15-17, Tabel 3.9.25 Kolom 15-17
Konsep	:	Dokter Gigi Spesialis
Definisi	:	Dokter Gigi Spesialis adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter Spesialis menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.20 Kolom 4-6, Tabel 3.9.21 Kolom 3-5, Tabel 3.9.22 Kolom 3-5, Tabel 3.9.23 Kolom 3-5, Tabel 3.9.24 Kolom 3-5, Tabel 3.9.25 Kolom 3-5
Konsep	:	Dokter Spesialias
Definisi	:	Dokter Spesialis adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah dokter Umum menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.20 Kolom 7-9, Tabel 3.9.21 Kolom 6-8, Tabel 3.9.22 Kolom 6-8, Tabel 3.9.23 Kolom 6-8, Tabel 3.9.24 Kolom 6-8, Tabel 3.9.25 Kolom 6-8
Konsep	:	Dokter Umum
Definisi	:	Dokter Umum adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.26 kolom 4-6, Tabel 3.9.27 kolom 4-6, Tabel 3.9.28 kolom 4-6, Tabel 3.9.29 kolom 4-6 Tabel 3.9.30 kolom 4-6, Tabel 3.9.31 kolom 4-6
Konsep	:	Tenaga Keperawatan
Definisi	:	Tenaga Kesehatan yang bekerja sebagai perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 38 tahun 2014

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bidan menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.26 kolom 7, Tabel 3.9.27 kolom 7, Tabel 3.9.28 kolom 7Tabel 3.9.29 kolom 7, Tabel 3.9.30 kolom 7, Tabel 3.9.31 kolom 7
Konsep	:	Bidan
Definisi	:	Tenaga kesehatan yang bekerja sebagai bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.32 Kolom 3-5, Tabel 3.9.33 Kolom 3-5, Tabel 3.9.34 Kolom 3-5, Tabel 3.9.35 Kolom 3-5 Tabel 3.9.36 Kolom 3-5, Tabel 3.9.37 Kolom 3-5
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Masyarakat
Definisi	:	Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan

		keluarga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.32 Kolom 6-8, Tabel 3.9.33 Kolom 6-8, Tabel 3.9.34 Kolom 6-8, Tabel 3.9.35 Kolom 6-8 Tabel 3.9.36 Kolom 6-8, Tabel 3.9.37 Kolom 6-8
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Lingkungan
Definisi	:	Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Gizi menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.32 Kolom 9-11, Tabel 3.9.33 Kolom 9-11, Tabel 3.9.34 Kolom 9-11, Tabel 3.9.35 Kolom 9-11, Tabel 3.9.36 Kolom 9-11, Tabel 3.9.37 Kolom 9-11
Konsep	:	Tenaga Gizi

Definisi	:	Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutririonis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keteknisan Medis menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.38 Kolom 12-14, Tabel 3.9.39 Kolom 12-14, Tabel 3.9.40 Kolom 12-14, Tabel 3.9.41 Kolom 12-14, Tabel 3.9.42 Kolom 12-14, Tabel 3.9.43 Kolom 12-14
Konsep	:	Tenaga Keteknisian Medis
Definisi	:	Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisian medis yang terdiri dari perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi (perawat anastesi), terapis gigi dan mulut (perawat gigi), dan audiologis.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.38 Kolom 3-5, Tabel 3.9.39 Kolom 3-5, Tabel 3.9.40 Kolom 3-5, Tabel 3.9.41 Kolom 3-5

		Tabel 3.9.42 Kolom 3-5, Tabel 3.9.43 Kolom 3-5
Konsep	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Definisi	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.38 Kolom 6-8, Tabel 3.9.39 Kolom 6-8, Tabel 3.9.40 Kolom 6-8, Tabel 3.9.41 Kolom 6-8 Tabel 3.9.42 Kolom 6-8, Tabel 3.9.43 Kolom 6-8
Konsep	:	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya
Definisi	:	Tenaga teknik biomedika lainnya adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri dari radiografer, elektromedis, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keterapian Fisik menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.38 Kolom 9-11, Tabel 3.9.39 Kolom 9-11, Tabel 3.9.40 Kolom 9-11, Tabel 3.9.41 Kolom 9-11, Tabel 3.9.42 Kolom 9-11, Tabel 3.9.43 Kolom 9-11
Konsep	:	Tenaga Keterapian Fisik
Definisi	:	Tenaga keterapian fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	UU Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kefarmasian Menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.44, Tabel 3.9.45, Tabel 3.9.46, Tabel 3.9.47, Tabel 3.9.48, Tabel 3.9.49
Konsep	:	Tenaga Kefarmasian
Definisi	:	Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.50, Tabel 3.9.51, Tabel 3.9.52, Tabel 3.9.53, Tabel 3.9.54, Tabel 3.9.55
Konsep	:	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan
Definisi	:	– Tenaga penunjang/pendukung kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. – Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. – Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya. – Tenaga dukungan manajemen Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Puskesmas/Rumah Sakit) dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.56 Kolom 4-6
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
Definisi	:	Tenaga kesehatan tradisional adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan tradisional melalui pendidikan. Tenaga kesehatan tradisional juga harus memiliki surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan tradisional. Ramuan adalah Bahan tumbuhan, Bahan hewan, Bahan

		mineral, Sediaan sarian (galenik), Campuran dari bahan tersebut.
Referensi Pemilihan	:	– Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018 – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Menurut Unit Kerja
Alias	:	Tabel 3.9.56 Kolom 7-9
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan
Definisi	:	Tenaga kesehatan tradisional keterampilan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan tradisional.
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.62, Tabel 3.9.63. Tabel 3.9.64
Konsep	:	Kelahiran, Jenis Kelamin, Lahir Hidup, Lahir Mati, Lahir Hidup dan Mati, Angka Lahir Mati per 1000 Kelahiran yang dilaporkan
Definisi	:	Banyaknya jumlah kelahiran bayi dalam periode satu tahun tertentu. Kelahiran bisa berupa lahir hidup maupun lahir mati. Lahir Hidup adalah Suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan,

		dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Lahir Mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas, Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.65, Tabel 3.9.66, Tabel 3.9.67
Konsep	:	Kematian Ibu Kelompok Umur, Jenis Kematian Ibu
Definisi	:	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas, Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 kolom 10, Tabel 3.9.69 kolom 10
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U

Definisi	:	Balita Berat Badan Risiko Lebih : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score lebih dari +1 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 Kolom 12
Konsep	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks B**B**/U
Definisi	:	Penjumlahan Balita Berat Badan Kurang dengan Jumlah Balita Berat Badan sangat kurang Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD, Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD, Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 kolom 3, Tabel 3.9.69 kolom 3
Konsep	:	Balita Ditimbang
Definisi	:	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 kolom 4, Tabel 3.9.69 kolom 4
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 kolom 6, Tabel 3.9.69 kolom 6

Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.68 kolom 8, Tabel 3.9.69 kolom 8
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Normal : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score mulai dari +1 sampai dengan -2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.70 kolom 4, Tabel 3.9.71 kolom 4
Konsep	:	Jumlah Balita Sangat Pendek

Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.70 kolom 6, Tabel 3.9.71 kolom 6
Konsep	:	Jumlah Balita Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Tinggi Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.70 kolom 8, Tabel 3.9.71 kolom 8
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U

Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score -2 SD sampai dengan +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Tinggi Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.70 kolom 8, Tabel 3.9.71 kolom 8
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score -2 SD sampai dengan +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.70 kolom 10, Tabel 3.9.71 kolom 10
Konsep	:	Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U)

memiliki Z score lebih dari +3 SD

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah balita gizi buruk
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 4, Tabel 3.9.73 kolom 4
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/TB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas dan Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Junlah Balita Gizi Kurang
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 6, Tabel 3.9.73 kolom 6
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi kurang
Definisi	:	Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2

SD sampai dengan -3 SD

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 8, Tabel 3.9.73 kolom 8
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score -2 SD s.d +1 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 10, Tabel 3.9.73 kolom 10
Konsep	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +1 SD s.d +2 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022

Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 12, Tabel 3.9.73 kolom 12
Konsep	:	jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +2 SD s.d +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.72 kolom 14, Tabel 3.9.73 kolom 14
Konsep	:	Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score lebih dari atau sama dengan +3 SD
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer

Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan
Alias	:	Tabel 3.9.74
Konsep	:	Balita Kurus
Definisi	:	Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Alias	:	Tabel 3.9.75
Konsep	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Definisi	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka

Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Alias	:	Tabel 3.9.76 Kolom 4-6
Konsep	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Definisi	:	Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik karena gangguan pada pembuluh darah. Sebagai akibatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Alias	:	Tabel 3.9.76 Kolom 7,9, Tabel 3.9.77 Kolom 7,9, Tabel 3.9.78 Kolom 7,9
Konsep	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Definisi	:	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan 2. Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Alias	:	Tabel 3.9.79 Kolom 4, Tabel 3.9.80 Kolom 4, Tabel 3.9.81 Kolom 4
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus
Definisi	:	Diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah secara terus-menerus. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Alias	:	Tabel 3.9.79 Kolom 5, Tabel 3.9.80 Kolom 5, Tabel 3.9.81 Kolom 5
Konsep	:	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Definisi	:	Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi: 1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; 3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

1. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi
2. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru

Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Alias	:	Tabel 3.9.82 Kolom 6
Konsep	:	Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Definisi	:	Deteksi dini dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang memiliki Riwayat hubungan seksual, deteksi dini kanker leher Rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan metode SADANIS di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Iva Positif
Alias	:	Tabel 3.9.82 Kolom 8, Tabel 3.9.83 Kolom 8, Tabel 3.9.84 Kolom 8
Konsep	:	Jumlah Iva Positif

Definisi	:	IVA positif : Ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat , IVA (Inspeksi Visual : dengan Asam asetat) Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Sasaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Alias	:	Tabel 3.9.85 Kolom 4, Tabel 3.9.86 Kolom , Tabel 3.9.87 Kolom 4
Konsep	:	Sasaran Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Definisi	:	Penderita Skizofrenia dan Psikosis akut. Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas
Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Alias	:	Tabel 3.9.85 Kolom 7, Tabel 3.9.86 Kolom 7, Tabel 3.9.87 Kolom 5-14
Konsep	:	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Definisi	:	Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. Menurut standardnya pelayanan kesehatan dilakukan oleh minimal 1 orang Dokter Umum/Spesialis Kedokteran Jiwa dan 1 orang Perawat/ Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa. ODGJ berat yang mendapat layanan adalah penderita Skizofrenia dan Psikosis Akut yang mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ). Gejala Psikotik akut yang di timbulkan sama dengan skizofrenia hanya belum sampai 30 hari. Skizofrenia yaitu Gangguan jiwa kompleks dengan persentasi klinis, perjalanan penyakit, dan respon terapi yang beragam. Gejala Skizofrenia terdiri dari: 1. Gejala positif, yaitu yang berlebihan dibandingkan fungsi normal, seperti waham, halusinasi, perilaku yang tidak terorganisasi; 2. Gejala negatif, dimana fungsi mental dan ekspresi emosi menjadi berkurang, misalnya ditandai dengan anhedonia, interaksi sosial yang terganggu, dan afek tumpul; 3. Gejala afektif, seperti cemas dan mood yang depresif; 4. Gejala kognitif, misalnya gangguan memori kerja dan episodik, gangguan atensi, gangguan fungsi eksekutif dsbnya. Skizofrenia apabila gejala tsb sudah lebih 30 hari.
Referensi Pemilihan	:	Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan Puskesmas 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan dan Puskesmas

Aturan Validasi	:	Harus Berisi Angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI STATISTIK KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Indikator	:	Jumlah Gross Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Gross Death Rate (GDR)
Definisi	:	Gross Death Rate (GDR) merupakan Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Semakin tinggi angkanya maka semakin banyak pasien yang keluar dalam keadaan meninggal
Metode/Rumus Perhitungan	:	GDR = Jumlah Seluruh Pasien Keluar Mati / Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) X 1000%
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Jumlah Net Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Net Death Rate (NDR)
Definisi	:	Net Death Rate (NDR) adalah Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir yaitu < 25 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.

Interpretasi	:	Semakin tinggi angkanya maka semakin banyak pasien yang keluar setelah lebih dar 48 jam dalam keadaan meninggal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Net Death Rate (NDR) = Jumlah Seluruh Pasien Keluar Mati Setelah Lebih dari 48 jam dirawat / Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) x 1000%
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Bed Occupancy Rate (BOR) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Bed Occupancy Rate (BOR)
Definisi	:	BOR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai BOR yang lebih rendah dari parameter ideal menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi (diluar parameter ideal) menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur.
Metode/Rumus Perhitungan	:	BOR = Jumlah hari perawatan/ (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun)x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak

Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	BTO (Bed Turn Over) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BTO (Bed Turn Over)
Definisi	:	BTO (Bed Turn Over) adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Nilai parameter BTO yang ideal adalah 40-50 kali dalam satu tahun. Nilai BTO dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai BTO yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan aspek klinis, seperti infeksi nosokomial rumah sakit. Hal ini terjadi karena jumlah pasien yang dirawat melebihi kapasitas tempat tidur yang ada, sehingga satu tempat tidur terlalu banyak digunakan oleh pasien secara berkali-kali.
Metode/Rumus Perhitungan	:	BTO (Bed Turn Over)= Jumlah pasien keluar (hidup + mati)/Jumlah tempat tidur
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kali
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	TOI (Turn Over Interval) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	TOI (Turn Over Interval)
Definisi	:	TOI (Turn Over Interval adalah Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI merupakan indikator yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai parameter TOI yang ideal pada kisaran 1-3 hari. Nilai TOI dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.

Interpretasi	:	Semakin besar nilai TOI, maka semakin lama tempat tidur kosong dan tidak digunakan oleh pasien.
Metode/Rumus Perhitungan	:	TOI =((Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam setahun) - Jumlah hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	ALOS (Average Length of Stay)
Definisi	:	ALOS (Average Length of Stay) merupakan rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Interpretasi	:	Nilai ALOS yang berada di bawah angka ideal dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: Sistem BPJS yang merupakan sistem paket dengan lama rawatan yang tidak terbatas, Banyak pasien umum yang PAPS dengan alasan kekurangan biaya
Metode/Rumus Perhitungan	:	ALOS = jumlah hari perawatan rumah sakit / jumlah pasien keluar (hidup dan mati).
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Jumlah Posyandu Aktif*

Konsep	:	Posyandu Aktif
Definisi	:	Jumlah Posyandu aktif merupakan Penjumlahan dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri Posyandu aktif memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi. 4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA).
Interpretasi	:	Semakin banyak jumlah posyandu aktif, maka semakin banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita.
Metode/Rumus Perhitungan	:	Posyandu Aktif = Posyandu Purnama + Posyandu Mandiri
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi menurut kecamatan dan puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan
Konsep	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Definisi	:	Jaminan Kesehatan Nasional adalah Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Cakupan Jaminan Kesehatan didapat dari Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama lalu dikali 100%
Interpretasi	:	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
Metode/Rumus Perhitungan	:	JKN = Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama × 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari: – PBI APBN – PBI APBD NON PBI terdiri dari : – Pekerja Penerima Upah (PPU) – Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri – Bukan Pekerja (BP)
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kecamatan
Konsep	:	Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan
Definisi	:	Banyaknya desa yang mengalokasikan sebagian dana desa untuk anggaran kesehatan pada kecamatan tertentu dibagi jumlah desa pada kecamatan tersebut dikali 100%

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak desa yang memanfaatka dana desa untuk layanan kesehatan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan = Banyaknya desa yang mengalokasikam sebagian dana desa untuk anggaran kesehatan pada kecamatan tertentu / Jumlah desa pada kecamatan tersebut X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Konsep	:	Persentase APBD Kesehatan
Definisi	:	Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota merupakan pembagian dari jumlah alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk kesehatan dalam 1 tahun dengan Jumlah total anggaran APBD pada tahun yang sama. Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota adalah Dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK : − Fisik (reguler, penugasan, afirmasi) − Non fisik (BOK, akreditasi, jampersal) Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak anggaran APBD yang dialokasikan ke dalam ranah keseatan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per TAhun = Jumlah Alokasi Kesehatan Pemerinah dalam 1 tahun (rupiah) di wilaya tertentu/ Jumlah penduduk pada wilayah dan tahun yang sama
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun (rupiah)
Konsep	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita
Definisi	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun; Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK : - Fisik (reguler, penugasan, afirmasi) - Non fisik (BOK, akreditasi, jampersal); Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;

Interpretasi	:	Semakin tinggi jumlah anggaran kesehatan pemerintah per kapita pe tahun maka semakin banyak dana yang dilokasikan untuk masyarakat per orangnya per tahun
Metode/Rumus Perhitungan	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per Tahun = Jumlah Alokasi Kesehatan Pemerinah dalam 1 tahun (rupiah) di wilayah tertentu/ Jumlah penduduk pada wilayah dan tahun yang sama
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah
Klasifikasi Penyajian	:	-
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U merupakan persentase banyaknya balita berat badan risiko lebih dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak balita yang memiliki berat badan lebih (overweight)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih = Jumlah balita berat badan risiko lebih / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Underweight Berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Underweight menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Underweight merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori underweight dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index BB/U. Balita underweight merupakan penambahan dari jumlah balita berat badan kurang dengan jumlah balita berat badan sangat kurang
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita underweight
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Underweight = Jumlah Balita Underweight/ Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U x 100% Jumlah Balita Underweight = Jumlah Balita berat badan kurang + Jumlah Balita berat badan sangat kurang
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori berat badan sangat kurang dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita berat badan sangat kurang
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang = Jumlah balita berat badan sangat kurang / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/Ux 100%

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Normal merupakan persentase dari Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori balita berat badan normal dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat menurut index BB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita berat badan normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Normal = Jumlah balita berat badan normal / Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita dengan Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita dengan Tinggi Badan Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Tinggi merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Tinggi dibagi dengan Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi menurut index TB/U

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita sangat tinggi
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Sangat Tinggi = Jumlah Balita Sangat Tinggi / Jumlah balita yang diukur panjang atau tinggi badan Menurut TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Pendek dibagi jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita sangat pendek
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Sangat Pendek = Jumlah Balita Sangat Pendek / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Pendek Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas

Konsep	:	Persentase Balita Pendek
Definisi	:	Persentase Balita Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Pendek dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita pendek
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Pendek = Jumlah Balita Pendek / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Tinggi Normal Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Tinggi Normal merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori tinggi badan normal dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita yang memiliki tinggi badan normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Tinggi Normal = Jumlah Balita Tinggi Normal / Jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan TB/U x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak

Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Stunting Berdasarkan Indeks TB/U menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Stunting menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Persentase Balita Stunting merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori stunting dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index TB/U. Balita stunting merupakan penambahan dari jumlah balita pendek dengan jumlah balita sangat pendek
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita stunting
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita Berat Badan Stunting = Jumlah Balita Stunting/ Jumlah balita diukur tingi badan menurut index TB/U x 100% Jumlah Balita Stunting = Jumlah Balita sangat pendek + Jumlah Balita pendek
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Resiko Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita resiko gizi lebih
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita Resiko gizi lebih = Jumlah Balita Resiko gizi lebih/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi lebih
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita gizi lebih= Jumlah Balita gizi lebih/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Obesitas Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB

Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Obesitas dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita Obesitas
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah Balita Obesitas = Jumlah Balita Obesitas/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Wasting Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Wasting menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita wasting merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Wasting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB. Balita Wasting merupakan penambahan dari Jumlah Balita Gizi Buruk dengan Balita Gizi Kurang. Balita Wasting yaitu Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) yang berada pada -3 SD s.d <-2 SD. Selain itu juga memiliki lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm.
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita Wasting
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Balita wasting = Jumlah Balita dengan kategori Wasting / Jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB X 100% Jumlah Balita Wasting = Balita Gizi Buruk + Balita Gizi Kurang
Ukuran	:	Persentase

Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Ya
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Buruk Berdasarkan Index BB/TBMenurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Buruk merupakan persentase dari Jumlah balita 0 – 59 bulan dengan status gizi buruk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah balita yang diukur menurut index (BB/TB)
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi buruk
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Jumlah Balita Gizi Buruk = Jumlah balita gizi buruk / Jumlah balita yang diukur berat badan (BB/TB) x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Prevalensi balita gizi kurang Berdasarkan Index BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Prevalensi balita gizi kurang
Definisi	:	Prevalensi balita gizi kurang merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-5 bulan dengan Gizi Kurang dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur menurut index BB/TB

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi kurang
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumlah balita gizi kurang = Jumlah Balita Gizi Kurang / Jumlah Balita yang diukur berat menurut index BB/TB x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Balita Gizi Normal Berdasakan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Normal merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-59 bulan dengan Gizi Normal dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) dikali 100%
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah balita gizi normal
Metode/Rumus Perhitungan	:	Jumla Balita Gizi Normal = Jumlah Balita Gizi Normal/ Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita Hipertensi

Definisi	:	Persentase pelayanan pada penderita hypertensi merupakan persentase dari Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Penderita Hipertensi dalam satu waktu tertentu
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlahpenderita hipertensi
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertesi = Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah Penderita Hipertensi di kabupaten/kota x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas, dan Menurut Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Menurut Kecamanan
Konsep	:	Persentase Pelayanan pada penderita diabetes
Definisi	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus merupakan persentase dari Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah penderita Diabetes Militus
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus = Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard

		dalam kurun waktu 1 tahun/Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas, dan Menurut Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan
Definisi	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah penemuan tumor/benjolan
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) = Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas

Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Curiga Kanker
Definisi	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah orang yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang dicurigai terkena kanker
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) = Jumlah perempuan yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Konsep	:	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis

(Sadanis)

Definisi	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) merupakan persentase Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama
Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang mengikuti Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara = Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan/Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Persentase Iva Positif Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Iva Positif
Definisi	:	Persentase Iva Positif merupakan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama

Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah perempuan yang terdeteksi IVA Positif
Metode/Rumus Perhitungan	:	Persentase Iva Positif = Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan)/Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama X 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan Puskesmas
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi	:	Kabupaten
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus menurut kecamatan
Konsep	:	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus
Definisi	:	Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : – Kemenkes – Pem.Prov – Pem.Kab/Kota – TNI – POLRI – BUMN – Swasta

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya menurut jenisnya
Konsep	:	Sarana Pelayanan Kesehatan, Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan
Definisi	:	Sarana Pelayanan Kesehatan selain Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti Klinik, Tempat Praktik Mandiri, Griya Sehat, Panti Sehat, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium Kesehatan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : – Kemenkes – Pem.Prov – Pem.Kab/Kota – TNI – POLRI – BUMN Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian menurut jenisnya
Konsep	:	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA), Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOt/UMOT), Produksi Alat Kesehatan, Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Kosmetika, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan (Alkes)
Definisi	:	Pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemilikan/Pengelolaan, yakni : – Kemenkes – Pem.Prov – Pem.Kab/Kota – TNI – POLRI – BUMN

Swasta

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Menurut tipe rumah sakit dan Kecamatan
Konsep	:	Rumah Sakit Umum Daerah
Definisi	:	Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
Klasifikasi Penyajian	:	– Klasifikasi Menurut Kecamatan – Klasifikasi Menurut Tipe Rumah Sakit • Rumah Sakit Tipe A • Rumah Sakit Tipe B • Rumah Sakit Tipe C • Rumah Sakit Tipe D
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Khusus menurut Klasifikasinya dan kecamatan
Konsep	:	Rumah Sakit Khusus
Definisi	:	Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya
Klasifikasi Penyajian	:	– Klasifikasi Menurut Kecamatan – Klasifikasi Menurut Pengelolaannya • Rumah Sakit Dikeelola Pemerintah • Rumah Sakit Dikelola Swasta
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah puskesmas menurut jenisnya dan kecamatan
Konsep	:	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Non Rawat Inap
Definisi	:	Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseOrangan (UKP) tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

Klasifikasi Penyajian	:	– Klasifikasi Menurut Kecamatan – Klasifikasi Menurut Jenis Puskesmas • Puskesmas Rawat Inap • Puskesmas Non Rawat Inap • Puskesmas Pembantu
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru rawat inap menurut puskesmas
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru gangguan jiwa menurut puskesmas
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan Pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru rawat jalan menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap untuk pertama

kalinya dalam satu tahun tertentu.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit dan Menurut Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki, Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru rawat inap menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap
Definisi	:	Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseOrangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit dan Menurut Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki, Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah kunjungan Pasien baru gangguan jiwa menurut rumah sakit
Konsep	:	Kunjungan Pasien Baru Gangguan Jiwa
Definisi	:	Kunjungan Pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit dan Menurut Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki, Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Pasien

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I
Konsep	:	Rumah Sakit, Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1
Definisi	:	Ketentuan umum pelayanan gawat darurat level 1 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan, Jumlah Desa, Desa yang Memanfaatkan Dana Desa dan Persentasenya
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah tempat tidur menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Tempat Tidur Rumah Sakit
Definisi	:	Tempat tidur yang berada di ruang rawat inap dan ruang pasca persalinan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati) menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pasien Keluar Hidup, Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Seluruh Pasien yang keluar dalam keadaan hidup dan keluar mati setelah kurang dari 48 jam maupun lebih dari 48 jam dirawat.
Klasifikasi Penyajian	:	- Klasifikasi Menurut Rumah Sakit - Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pasien Keluar Mati
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat kurang dari 48 jam
Klasifikasi Penyajian	:	- Klasifikasi Menurut Rumah Sakit - Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pasien Keluar Mati > 48 jam dirawat menurut rumah sakit di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Pasien Keluar Mati Lebih dari 48 jam dirawat
Definisi	:	Pasien yang keluar dalam keadaan mati setelah dirawat lebih dari 48 jam

Klasifikasi Penyajian	:	- Klasifikasi Menurut Rumah Sakit - Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin : • Laki-laki • Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Gross Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Gross Death Rate
Definisi	:	Gross Death Rate (GDR) merupakan Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 Pasien keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu

Nama Variabel	:	Jumlah Net Death Rate menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Net Death Rate
Definisi	:	Net Death Rate (NDR) adalah Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 Pasien keluar. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir yaitu < 25 per 1000. Nilai GDR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Perseribu
Satuan	:	Perseribu

Nama Variabel	:	Jumlah Hari Perawatan menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Hari Perawatan
Definisi	:	Total hari rawat dari semua Pasien yang dirawat selama satu tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	Jumlah Lama dirawat menurut Rumah Sakit

Konsep	:	Lama Dirawat
Definisi	:	Total lama dirawat dari Pasien sejak masuk sampai pulang, selama satu tahun
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	BOR (Bed Occupancy Rate) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BOR (Bed Occupancy Rate)
Definisi	:	BOR (Bed Occupancy Rate)adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	BTO (Bed Turn Over) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	BTO (Bed Turn Over)
Definisi	:	BTO (Bed Turn Over) adalah Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Nilai parameter BTO yang ideal adalah 40-50 kali dalam satu tahun. Nilai BTO dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Kali

Nama Variabel	:	TOI (Turn Over Interval) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	TOI (Turn Over Interval)
Definisi	:	TOI (Turn Over Interval adalah Rata-rata Hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI merupakan indikator yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Nilai parameter TOI yang ideal pada kisaran 1-3 Hari. Nilai TOI dari setiap RS dapat diperoleh dari

pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	ALOS (Average Length of Stay)
Definisi	:	ALOS (Average Length of Stay) merupakan rata-rata lama rawat (dalam satuan Hari) seOrang Pasien. Nilai parameter ALOS yang ideal adalah 6-9 Hari. Nilai ALOS dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja (Rumah Sakit)
Ukuran	:	Waktu
Satuan	:	Hari

Nama Variabel	:	ALOS (Average Length of Stay) menurut Rumah Sakit
Konsep	:	Jumlah Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Definisi	:	Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
Klasifikasi Penyajian	:	Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional
Ukuran	:	Klasifikasi Menurut Unit Kerja, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit dan Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki dan Perempuan
Satuan	:	Jumlah

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Pratama

Konsep	:	Posyandu Pratama
Definisi	:	Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) Orang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Madya
Konsep	:	Posyandu Madya
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan Pengelolaan Posyandu rata-rata jumlahkader sebanyak lima Orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Purnama
Konsep	:	Posyandu Purnama
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima Orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Posyandu Mandiri
Konsep	:	Posyandu Mandiri
Definisi	:	Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima Orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan

pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan dan Puskesmas

Ukuran : Jumlah
Satuan : Unit

Nama Variabel : Jumlah Posyandu Aktif*

Konsep : Posyandu Aktif

Definisi : Jumlah Posyandu aktif merupakan Penjumlahan dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri Posyandu aktif memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan Hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik Hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes.
2. Posyandu memiliki kader minimal 5 Orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah
3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi.
4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA).

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi menurut kecamatan dan puskesmas

Ukuran : Jumlah
Satuan : Unit

Nama Variabel : Jumlah Posbindu PTM**

Konsep : Posbindu PTM

Definisi : Upaya kesehatan berbasis bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining kesehatan/deteksi dini faktor risiko PTM, intervensi/modifikasi faktor risiko PTM serta

		monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM bersumber daya masyarakat secara rutin dan berkesinambungan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi menurut kecamatan dan puskesmas
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah dokter gigi Umum menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Gigi
Definisi	:	Dokter Gigi adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran).
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Unit Kerja (Puskesmas dan Rumah Sakit)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokter

Nama Variabel	:	Jumlah Dokter gigi Spesialis menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Gigi Spesialis
Definisi	:	Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran).
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Unit Kerja (Puskesmas dan Rumah Sakit)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokter

Nama Variabel	:	Jumlah Dokter Spesialis menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Spesialias
Definisi	:	Dokter Spesialis adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran).
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Unit Kerja (Puskesmas dan Rumah Sakit)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokter

Nama Variabel	:	Jumlah Dokter Umum menurut Unit Kerja
Konsep	:	Dokter Umum
Definisi	:	Dokter Umum adalah Dokter lulusan pendidikan keDokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik KeDokteran).
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Unit Kerja (Puskesmas dan Rumah Sakit)
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Dokter

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Keperawatan menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Keperawatan
Definisi	:	Tenaga Kesehatan yang bekerja sebagai perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa.
Klasifikasi Penyajian	:	Kalsifikasi Menurut Unit Kerja
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bidan menurut Unit Kerja
Konsep	:	Bidan
Definisi	:	Tenaga kesehatan yang bekerja sebagai bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Penyajian	:	Kalsifikasi Menurut Unit Kerja
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Masyarakat
Definisi	:	Tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan

kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Lingkungan
Definisi	:	Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Gizi menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Gizi
Definisi	:	Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari : - Nutririonis - dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Keteknisan Medis menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Keteknisian Medis
Definisi	:	Tenaga keteknisian medis adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keteknisian medis yang terdiri dari : - Perekam medis dan informasi Kesehatan - Teknik kardiovaskuler - Teknisi pelayanan darah - Refraksionis optisien/optometris - Teknisi gigi

- Penata anestesi (perawat anastesi)
- Terapis gigi dan mulut (perawat gigi)
- Audiologis.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut Unit Kerja
Konsep : Ahli Teknologi Laboratorium Medik
Definisi : Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap Orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseOrangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya menurut Unit Kerja
Konsep : Tenaga Teknik Biomedika Lainnya
Definisi : Tenaga teknik biomedika lainnya adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang teknik biomedika yang terdiri dari :
- Radiographer
- Elektromedis
- fisikawan medik
- radioterapis
- dan ortotik prostetik.

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Keterapian Fisik menurut Unit Kerja
Konsep : Tenaga Keterapian Fisik

Definisi	:	Tenaga keterapian fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri dari : – Fisioterapis – Okupasi terapis – Terapis wicara – Akupunktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kefarmasian Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kefarmasian
Definisi	:	Tenaga kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kefarmasian yang terdiri dari : – Apoteker – Tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan
Definisi	:	– Tenaga penunjang/pendukung kesehatan adalah tenaga selain tenaga kesehatan yang bekerja di sektor/bidang kesehatan yang meliputi pejabat struktural, tenaga pendidik, dan tenaga dukungan manajemen. – Pejabat struktural adalah tenaga yang menempati jabatan struktural di institusi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. – Tenaga pendidik adalah tenaga yang bertugas mengajar di institusi pendidikan yang terdiri dari dosen, widyaiswara, dan lainnya. – Tenaga dukungan manajemen Tenaga dukungan manajemen terdiri dari pengelola program kesehatan, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan,

dan tenaga penunjang kesehatan lainnya.

Klasifikasi Penyajian	:	– Klasifikasi Menurut Kecamatan – Klasifikasi Menurut Jenis Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan, yang terdiri atas : • Pejabat Struktural • Tenaga Pendidik • Tenaga Dukungan Managemen
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
Definisi	:	Tenaga kesehatan tradisional adalah Orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan tradisional melalui pendidikan. Tenaga kesehatan tradisional juga harus memiliki surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan tradisional. Ramuan adalah Bahan tumbuhan, Bahan hewan, Bahan mineral, Sediaan sarian (galenik), Campuran dari bahan tersebut.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Menurut Unit Kerja
Konsep	:	Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan
Definisi	:	Tenaga kesehatan tradisional keterampilan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan tradisional.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menuurt Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Segmen Kepesertaan
Konsep	:	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Definisi	:	Jaminan Kesehatan Nasional adalah Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap Orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Cakupan Jaminan Kesehatan didapat dari Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama lalu dikali 100%
Klasifikasi Penyajian	:	Berdasarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri dari: – PBI APBN – PBI APBD NON PBI terdiri dari : – Pekerja Penerima Upah (PPU) – Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri – Bukan Pekerja (BP)
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan Menurut Kecamatan
Konsep	:	Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan
Definisi	:	Banyaknya desa yang mengalokasikan sebagian dana desa untuk anggaran kesehatan pada kecamatan tertentu dibagi jumlah desa pada kecamatan tersebut dikali 100%
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Konsep	:	Persentase APBD Kesehatan
Definisi	:	Persentase Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota merupakan pembagian dari jumlah alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk kesehatan dalam 1 tahun dengan Jumlah total anggaran APBD pada tahun yang sama. Anggaran Kesehatan dalam APBD Kab/Kota adalah

		Dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota, Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun; Dana Alokasi Khusus yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jenis DAK: – fisik (reguler, penugasan, afirmasi) – non fisik (BOK, akreditasi, jampersal) Dana Dekonsentrasi yaitu Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun (rupiah)
Konsep	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita
Definisi	:	Anggaran Kesehatan Pemerintah per Kapita per tahun yaitu Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah (melalui APBN, APBD, dan PHLN tanpa anggaran belanja tidak langsung) untuk biaya penyelenggaraan upaya kesehatan per kapita per tahun;
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rupiah

Nama Variabel	:	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Konsep	:	Kelahiran, Jenis Kelamin, Lahir Hidup, Lahir Mati, Lahir

		Hidup dan Mati, Angka Lahir Mati per 1000 Kelahiran yang dilaporkan
Definisi	:	Jumlah Lahir Hidup maupun Lahir Mati. Lahir Hidup adalah Suatu Kelahiran seOrang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot. Lahir Mati adalah Kelahiran seOrang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menuurt Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Kematian Ibu Kelompok Umur, Jenis Kematian Ibu
Definisi	:	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 Hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemlikan/Pengelolaan, yaitu: -BUMN, -Swasta, Organisasi Kemasyarakatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Lahir hidup Menurut jenis Kelamin, kecamatan dan puskesmas
Konsep	:	Lahir Hidup, Jenis Kelamin, Kecamatan, Puskesmas
Definisi	:	Suatu Kelahiran seOrang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kepemlikan/Pengelolaan, yaitu: -BUMN, -Swasta, Organisasi Kemasyarakatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U

Definisi	:	Balita Berat Badan Risiko Lebih : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score lebih dari +1 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Puskesmas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan Menurut Jenis Kelamin yakni Laki-Laki dan Perempuan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Risiko Lebih (Overweight) berdasarkan Indeks BB/U merupakan persentase banyaknya balita berat badan risiko lebih dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut indeks BB/U.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Penjumlahan Balita Berat Badan Kurang dengan Jumlah Balita Berat Badan sangat kurang Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD, Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD, Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Underweight menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Penjumlahan Balita Berat Badan Kurang dengan Jumlah Balita Berat Badan sangat kurang Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD, Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD, Z score : Nilai simpangan berat badan atau tinggi badan dari nilai berat badan atau tinggi badan normal menurut baku pertumbuhan WHO
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Ditimbang
Definisi	:	Jumlah balita usia 0-59 bulan yang dilakukan penimbangan berat badan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) dan Menurut Jenis Kelamin yakni Laki-Laki dan Perempuan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Sangat Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Sangat Kurang merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori berat badan sangat kurang dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Kurang : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Kurang Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Kurang Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Underweight merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori underweight dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat badan menurut index BB/U Jumlah Balita Underweight merupakan penambahan dari jumlah balita berat badan kurang dengan balita berat badan sangat kurang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks

BB/U Kecamatan dan Puskesmas

Konsep	:	Jumlah Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Balita Berat Badan Normal : Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut umur (BB/U) memiliki Z score mulai dari +1 sampai dengan -2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Berat Badan Normal Menurut Indeks BB/U
Definisi	:	Persentase Balita Berat Badan Normal merupakan persentase dari Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori balita berat badan normal dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berat menurut index BB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Sangat Tinggi Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score lebih dari +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Rumah Sakit dan Menurut Jenis Kelamin, yaitu Laki-laki, Perempuan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Tinggi Badan Sangat Tinggi Berdasarkan Indeks TB/U

Definisi	:	Persentase Balita Sangat Tinggi merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Tinggi dibagi dengan Jumlah balita yang diukur panjang/tinggi menurut index TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Prevalensi stunting
Konsep	:	Prevalensi stunting
Definisi	:	Persentase Balita Stunting merupakan persentase dari jumlah anak berusia 0-59 bulan dengan kategori stunting dibagi dengan Jumlah balita yang ditimbang berdasarkan index TB/U. Balita stunting merupakan penambahan dari jumlah balita pendek dengan jumlah balita sangat pendek
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Sangat Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Sangat Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Sangat Pendek Berdasakan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Definisi	:	Persentase Balita Sangat Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Sangat Pendek dibagi jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Pendek Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Pendek
Definisi	:	Balita Pendek adalah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score kurang dari -2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Pendek Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Pendek
Definisi	:	Persentase Balita Pendek merupakan persentase dari Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Pendek dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Tinggi Normal Menurut Indeks TB/U Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z score -2 SD sampai dengan +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Tinggi Normal Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Normal Menurut Indeks TB/U

Definisi	:	Persentase Balita Tinggi Normal merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori tinggi badan normal dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur tinggi badan menurut index TB/U
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +1 SD s.d +2 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Resiko Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Resiko Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	jumlah Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score +2 SD s.d +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Lebih Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Gizi Lebih Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Gizi Lebih dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score lebih dari atau sama dengan +3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Obesitas Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Obesitas Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Lebih merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Obesitas dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Persentase Balita Wasting Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Wasting menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita wasting merupakan persentase dari jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori Wasting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur menurut index BB/TB.

		Balita Wasting merupakan penambahan dari Jumlah Balita Gizi Buruk dengan Balita Gizi Kurang Balita Wasting yaitu Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) yang berada pada -3 SD s.d <-2 SD. Selain itu juga memiliki lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 12,5 cm sampai dengan 11,5 cm.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah balita gizi buruk
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Jumlah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/TB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Buruk Berdasarkan Index BB/TBMenurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Buruk
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Buruk merupakan persentase dari Jumlah balita 0 – 59 bulan dengan status gizi buruk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah balita yang diukur menurut index (BB/TB)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Junlah Balita Gizi Kurang
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi kurang
Definisi	:	Jumlah Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Prevalensi balita gizi kurang Berdasarkan Index BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Prevalensi balita gizi kurang
Definisi	:	Prevalensi balita gizi kurang merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-5 bulan dengan Gizi Kurang dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur menurut index BB/TB
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB, Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Jumlah Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurutTinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score -2 SD s.d +1 SD
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Balita Gizi Normal Berdasakan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Konsep	:	Persentase Balita Gizi Normal Menurut Indeks BB/TB
Definisi	:	Persentase Balita Gizi Normal merupakan persentase dari Jumlah anak usia 0-59 bulan dengan Gizi Normal dibagi dengan Jumlah Balita yang diukur (BB/TB) dikali 100%
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan
Konsep	:	Balita Kurus

Definisi	:	Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan gabungan dari istilah sangat kurus dan kurus dengan Z score < -2 standar deviasi
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Konsep	:	Bayi Usia 6-24 Bulan Menerima Makanan Pendamping ASI
Definisi	:	Banyaknya anak yang berusia 6-24 Bulan yang menerima makanan pendamping ASI
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Konsep	:	Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi >= 15 tahun
Definisi	:	Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah menjadi naik karena gangguan pada pembuluh darah. Sebagai akibatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Konsep	:	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Definisi	:	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: − Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu

kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

Klasifikasi Penyajian :
- Klasifikasi Menurut Kecamatan
- Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin yaitu :
  - Laki-laki
  - Perempuan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi Menurut Kecamatan
Konsep : Persentase Pelayanan pada penderita Hipertensi
Definisi : Persentase pelayanan pada penderita hypertensi merupakan persentase dari Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Penderita Hipertensi dalam satu waktu tertentu
Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen

Nama Variabel : Jumlah Penderita Diabetes Militus

Konsep : Jumlah Penderita Diabetes Militus
Definisi : Diabetes mellitus adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula (glukosa) dalam darah secara terus-menerus. Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru
Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Konsep : Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standard
Definisi : Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi:

1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi;
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:
- Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi
- Jumlah penderita DM kabupaten/kota diperoleh berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru

Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Menurut Kecamanan
Konsep : Persentase Pelayanan pada penderita diabetes
Definisi : Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus merupakan persentase dari Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM)usia >=15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu 1 tahun dibagi dengan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) usia >= 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan anka prevalensi kabupaten atau kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Persentase
Satuan : Persen

Nama Variabel : Jumlah Tumor/benjolan
Konsep : Jumlah Tumor/benjolan
Definisi : Benjolan tidak normal pada payudara pada pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan terlatih
Klasifikasi Penyajian : Klasifikasi Menurut Kecamatan

Ukuran : Jumlah
Satuan : Orang

Nama Variabel : Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS)

Menurut Kecamatan

Konsep	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan
Definisi	:	Persentase Penemuan Tumor/Benjolan pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang ditemukan tumor/benjolan pada payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Curiga Kaker
Konsep	:	Jumlah Curiga Kaker
Definisi	:	Perempuan usia 30-50 tahun yang dicurigai memiliki tumor/benjolan dan dicurigai menderita kanker payudara berdasarkan pemeriksaan sadanis yang dirujuk ke pelayanan kesehatan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Curiga Kanker
Definisi	:	Persentase Curiga Kanker pada deteksi dini Kanker Payudara dan Tumor Rahim (SADANIS) merupakan persentase dari Jumlah Orang yang dicurigai kanker payudara di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Konsep	:	Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Definisi	:	Deteksi dini dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun yang memiliki Riwayat hubungan seksual, deteksi dini kanker leher Rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan metode SADANIS di fasyankes, minimal 80% pada sasaran penduduk di satu wilayah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Konsep	:	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis)
Definisi	:	Persentase Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) merupakan persentase Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30-50 tahun pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

Nama Variabel	:	Jumlah Iva Positif
Konsep	:	Jumlah Iva Positif
Definisi	:	IVA positif : Ditemukan bercak putih (lesi pra kanker) dengan pemeriksaan aplikasi asam asetat , IVA (Inspeksi Visual : dengan Asam asetat) Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium. Deteksi dini yang

		dimaksud dapat dilakukan di puskesmas dan jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Persentase Iva Positif Menurut Kecamatan
Konsep	:	Persentase Iva Positif
Definisi	:	Persentase Iva Positif merupakan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun dengan IVA positif di suatu wilayah pada periode tertentu (kumulatif 3 tahunan) dibagi dengan Jumlah perempuan usia 30 –50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (Sadanis) pada wilayah dan periode waktu yang sama
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi Menurut Kecamatan
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen

MS-KEG KOMPILASI
STATISTIK INFRASTRUKTUR KABUPATEN

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Statistik Infrastruktur Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan	:	Perwilayahan Dan Perkotaan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Ateik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum
Email	:	-

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Teknis	:	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Alamat	:	Jl. Ateik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum
Email	:	-

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Berdasarkan Aturan Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Dimana Walidata Daerah Wajib Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Pemeriksaan Dan Publikasi Data Sektoral. Selain Itu Dikarenakan Data-data Sektoral Yang Ada Di Lingkup Kabupaten Tangerang Masih Tersebar Dan Belum Terarsipkan Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Ini Diharapkan Data Dapat Dengan Mudah
Tujuan Kegiatan	:	Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Memudahkan

Masyarakat Dalam Mendapatkan Informasi Yang Mereka Butuhkan

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	01 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023
Pengumpulan Data	01 Februari 2024 s.d. 10 Februari 2024
Pengolahan	11 Februari 2024 s.d. 28 Februari 2024
Analisis	01 Maret 2024 s.d. 10 Maret 2024
Diseminasi	15 Maret 2024 s.d. 20 Maret 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
- Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Tangerang
- Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang
- Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Tangerang
- Panjang Drainase di Kabupaten Tangerang
- Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Tangerang
- Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Tangerang

- Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
- Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
- Jumlah Bangunan Irigasi di Kabupaten Tangerang
- Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Panel*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya : Kecamatan dan Desa

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma I/II/III
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Ya
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya

Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Lainnya: Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Kabupaten/Kota

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	01 Mei 2024
Digital	:	01 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR
KOMPILASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
Alias	:	Tabel 3.13.2
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
Definisi	:	Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan nasional adalah Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota

		provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.3
Konsep	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi
Definisi	:	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Luas irigasi menurut kecamatan dan kondisi adalah luas daerah irigasi yang dikelompokkan menurut kecamatan dan kondisi baik dan atau rusak.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Alias	:	Tabel 3.13.4
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan
Definisi	:	Panjang jalan yang dekolompokkan berdasarkan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.5
Konsep	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)
Definisi	:	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air dengan panjang minimal 1,5 m.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.6
Konsep	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Definisi	:	Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan. Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan oleh pedagang kaki lima Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Bangunan Rumah Liar adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan untuk berdirinya bangunan liar
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.7
Konsep	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
Definisi	:	garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai namun digunakan untuk mendirikan bangunan liar.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Drainase di Kabupaten Tangerang

Alias	:	Tabel 3.13.8
Konsep	:	Panjang drainase
Definisi	:	Pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.9
Konsep	:	Luas Daerah Rawan Genangan atau Berpotensi Genangan
Definisi	:	Luas Daerah yang rawan terdapat genangan atau berpotensi genangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.10
Konsep	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Definisi	:	Banyaknya pembangunan turap atau struktur konstruksi batu yang berbentuk dinding dan berfungsi untuk menyokong tekanan dan gerakan tanah yang kurang stabil pada jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.11
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
Definisi	:	Panjang jalan yang didasarkan pada permukaan jalan aspal, beton,kerikil,tanah dan lainnya
Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Jenis Permukaan Jalan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.12
Konsep	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi
Definisi	:	Banyaknya jembatan yang dikelompokkan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan atau rusak berat. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Referensi Pemilihan	:	
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
Alias	:	Tabel 3.13.14
Konsep	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang Drainase Sistem Terbuka Menurut Kondisi adalah Panjang drainase dengan system terbuka yang dikelompokkan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Drainase adalah saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Alias	:	Tabel 3.13.16
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Alias	:	Tabel 3.13.17
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Alias	:	Tabel 3.13.19
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Bangunan Irigasi di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.21
Konsep	:	Jumlah Bangunan Irigasi
Definisi	:	Banyaknya Bangunan Irigasi
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.13.22
Konsep	:	Panjang sungai
Definisi	:	Sungai adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Nama Sungai
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA
KOMPILASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

Nama Variabel	:	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
Konsep	:	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah
Definisi	:	Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan nasional adalah Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.
Klasifikasi Penyajian	:	-Jalan Nasional -Jalan Provinsi -Jalan Kabupaten
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Km

Nama Variabel	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Luas Irigasi Menurut Kecamatan dan Kondisi

Definisi	:	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Klasifikasi Penyajian	:	-Kondisi Baik -Kondisi Rusak
Ukuran	:	Luas
Satuan	:	Ha

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
Definisi	:	Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan. Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan oleh pedagang kaki lima Panjang Sempadan Jalan yang dipakai Bangunan Rumah Liar adalah Panjang sempadan jalan yg digunakan untuk berdirinya bangunan liar
Klasifikasi Penyajian	:	Kecamatan
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Km

Nama Variabel	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
Definisi	:	garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai namun digunakan untuk mendirikan bangunan liar.
Klasifikasi Penyajian	:	Kecamatan
Ukuran	:	Panjang

Satuan	:	Km

Nama Variabel	:	Panjang Drainase di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Panjang drainase
Definisi	:	Pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang.
Klasifikasi Penyajian	:	-Pembuangan aliran air tersumbat -Pembuangan aliran air tidak tersumbat
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Km

Nama Variabel	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Jumlah Pembangunan Turap di Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Definisi	:	Banyaknya pembangunan turap atau struktur konstruksi batu yang berbentuk dinding dan berfungsi untuk menyokong tekanan dan gerakan tanah yang kurang stabil pada jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor.
Klasifikasi Penyajian	:	Kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Jumlah Jembatan Menurut Kondisi
Definisi	:	Banyaknya jembatan yang dikelompokkan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan atau rusak berat. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Klasifikasi Penyajian	:	Kondisi baik, Kondisi sedang, Kondisi rusak ringan, Kondisi rusak berat

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Primer Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya
Klasifikasi Penyajian	:	Kondisi baik, Kondisi sedang, Kondisi rusak ringan, Kondisi rusak berat
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Meter

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Klasifikasi Penyajian	:	Kondisi baik, Kondisi sedang, Kondisi rusak ringan, Kondisi rusak berat
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Meter

Nama Variabel	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Konsep	:	Panjang Saluran Irigasi Tersier Menurut Kondisi
Definisi	:	Panjang irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
Klasifikasi Penyajian	:	Kondisi baik, Kondisi sedang,

		Kondisi rusak ringan, Kondisi rusak berat
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Meter

Nama Variabel	:	Panjang Sungai di Kabupaten Tangerang
Konsep	:	Panjang Sungai
Definisi	:	Sungai adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
Klasifikasi Penyajian	:	Nama Sungai
Ukuran	:	Panjang
Satuan	:	Meter

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Pembangunan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-
PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	sektoraldtrb@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Tata Ruang

Alamat	:	Jl. H. Somawinata No.1, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Email	:	sektoraldtrb@gmail.com

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Latar Belakang Kegiatan : Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Menghetahui Geografi Atau Luas Wilayah Kabupaten Tangerang Dari Tingkat Kecamatan Hinggan Tingkat Desa/kelurahan

Tujuan Kegiatan : Mengetahui Luas Setiap Wilayah Kecamatan Desa/kelurahan Dan Mendata Titik Koordinat Wilayah Dan Ruang Terbuka Hijau (rth)

Jadwal Kegiatan :

Perencanaan/Persiapan	08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data	03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan	01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis	01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi	01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan :

- Luas Ruang Terbuka Hijau
- Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
- Luas Daerah
- Luas Wilayah
- Titik Koordinat Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang
- Jumlah Gudang
- Jumlah Pulau
- Rencana Peruntukkan RTRW
- Realisasi RTRW
- Tinggi wilayah
- Jarak ke Ibukota Kabupaten

DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan : Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA

Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		1 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Ya

PENGOLAHAN DAN ANALISIS

Tahapan Pengolah Data

Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL

Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024

Data Mikro : -

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Nama Variabel	:	Luas Ruang Terbuka Hijau
Alias	:	Tabel 3.14.2
Konsep	:	Ruang Terbuka Hijau
Definisi	:	Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
Referensi Pemilihan	:	PERMEN ATR/KBPN No 14 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Alias	:	Tabel 3.14.1
Konsep	:	RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Definisi	:	Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dikali 20% (dua puluh persen)
Referensi Pemilihan	:	PERMEN ATR/KBPN No 14 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan

Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Daerah
Alias	:	Tabel 3.14.3
Konsep	:	Luas Daerah
Definisi	:	Luas Kecamatan yang dihitung berdasarkan delineasi Kecamatan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Wilayah
Alias	:	Tabel 3.14.4
Konsep	:	Luas Wilayah
Definisi	:	Luas Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang
Alias	:	Tabel 3.14.4
Konsep	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan
Definisi	:	Titik Koordinat Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan titik tengah (centroid) dari delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Titik koordinat dinyatakan dengan lintang dan bujur dengan sistem koordinat WGS 1984

Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Gudang
Alias	:	Tabel 3.14.5
Konsep	:	Gudang
Definisi	:	Jumlah gudang yang berada di Kabupaten Tangerang berdasarkan data IMB/PBG dengan bentuk kegiatan pergudangan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pulau
Alias	:	Tabel 3.14.6
Konsep	:	Pulau
Definisi	:	Jumlah pulau yang berada di dalam batas administrasi kecamatan di Kabupaten Tangerang
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Rencana Peruntukkan RTRW
Alias	:	Tabel 3.14.7 dan 3.14.8
Konsep	:	Rencana Peruntukkan RTRW

Definisi	:	Luas Rencana Pola Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (RTRW)
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Realisasi RTRW
Alias	:	Tabel 3.14.7 dan 3.14.8
Konsep	:	Realisasi RTRW
Definisi	:	Luas daerah yang telah sesuai dengan Rencana Ruang yang dihitung berdasarkan data tutupan lahan
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Tinggi wilayah
Alias	:	Tabel 3.14.10
Konsep	:	Tinggi wilayah
Definisi	:	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Alias	:	Tabel 3.14.10

Konsep	:	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Definisi	:	Data jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	2023
Tipe Data	:	*Float*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

MS-IND KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Nama Indikator	:	Persentase Luas Daerah terhadap Luas Kabupaten
Konsep	:	Luas Daerah
Definisi	:	Perbandingan Luas Kecamatan terhadap Kabupaten
Interpretasi	:	-
Metode/Rumus Perhitungan	:	Luas Daerah/Total Luas wlayah Kabupaten Tangerang x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang
Konsep	:	-
Definisi	:	Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang
Interpretasi	:	Semakin tinggi tingkat kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan terhadap pola dan struktur ruang maka semakin baik

Metode/Rumus Perhitungan	:	Realisai Program atau Kegiatan Pembangunan / Rencana Program atau Kegiatan Pembangunan yang terdapat dalam RT RW x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Indikator	:	Ketaatan Terhadap RTRW
Konsep	:	Ketaatan Terhadap RTRW
Definisi	:	Kesesuaian Pemanfaatn ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Interpretasi	:	Semakin tinggi tingkat kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka semakin baik
Metode/Rumus Perhitungan	:	Realisasi RT RW/Rencana Peruntukkan x 100%
Ukuran	:	Persentase
Satuan	:	Persen
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Indikator Komposit	:	Tidak
Level Estimasi		Kecamatan
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Nama Variabel	:	Luas Ruang Terbuka Hijau
Konsep	:	Ruang Terbuka Hijau
Definisi	:	Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok

		yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Konsep	:	RTH publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Definisi	:	Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dikali 20% (dua puluh persen)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Luas Daerah
Konsep	:	Luas Daerah
Definisi	:	Luas Kecamatan yang dihitung berdasarkan delineasi Kecamatan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Luas Wilayah
Konsep	:	Luas Wilayah
Definisi	:	Luas Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan
Konsep	:	Titik Koordinat Desa/Kelurahan

Definisi	:	Titik Koordinat Desa / Kelurahan yang dihitung berdasarkan titik tengah (centroid) dari delineasi Desa / Kelurahan yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Titik koordinat dinyatakan dengan lintang dan bujur dengan sistem koordinat WGS 1984
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Nilai
Satuan	:	Koordinat

Nama Variabel	:	Jumlah Gudang
Konsep	:	Gudang
Definisi	:	Jumlah gudang yang berada di Kabupaten Tangerang berdasarkan data IMB/PBG dengan bentuk kegiatan pergudangan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Jumlah Pulau
Konsep	:	Pulau
Definisi	:	Jumlah pulau yang berada di dalam batas administrasi kecamatan di Kabupaten Tangerang
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Unit

Nama Variabel	:	Rencana Peruntukkan RTRW
Konsep	:	Rencana Peruntukkan RTRW
Definisi	:	Luas Rencana Pola Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (RTRW)
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Realisasi RTRW
Konsep	:	Realisasi RTRW
Definisi	:	Luas daerah yang telah sesuai dengan Rencana Ruang

		yang dihitung berdasarkan data tutupan lahan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km^2

Nama Variabel	:	Tinggi wilayah
Konsep	:	Tinggi wilayah
Definisi	:	Tinggi wilayah di atas permukaan laut
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Mdpl

Nama Variabel	:	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Konsep	:	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Definisi	:	Data jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Km

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS SOSIAL

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Dan Kesejahteraan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Ateik Soewardi No. 1 Lingkup Gedung Pekerjaan Umum Lantai I
Email	:	dinsos.tangerangkab@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dan Pengelolaan Data
Alamat	:	Jl. Atik Soewardi No. 1 Kompel Perkantoran Pemda Lantai I Lingkup Gedung Pu
Email	:	dinsosbidangdata22@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dilakukan Dalam Rangka Pemutakhiran 25 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (ppks) Di Kabupaten Tangerang, Terlebih Penerima Program Bansos Dan Jenis Ppks Lainnya Yang Sangat Krusial Sebagai Tolak Ukur Perencanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang.
Tujuan Kegiatan	:	Mendapatkan Data Ppks Yang Valid
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan - Jumlah Keluarga Fakir Miskin Menurut Kecamatan - Jumlah Penerima Bantuan Iuran menurut sumber pendanaan - Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Berdasarkan Jenisnya - Jumlah Penyandang Disabilitas

- Jumlah Lansia yang tidak Potensial yang menerima Jaminan Sosial
- Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Graduasi
- Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan dan Kecamatan
- Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi
- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak
- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Dinas Sosial Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		4 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah
DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS SOSIAL

Nama Variabel	:	Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.19.2
Konsep	:	Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika
Definisi	:	Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami

		atau sintetis. NAPZA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Fakir Miskin Menurut Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.19.3
Konsep	:	Keluarga Fakir Miskin
Definisi	:	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penerima Bantuan Iuran menurut sumber pendanaan
Alias	:	Tabel 3.19.4
Konsep	:	Penerima Bantuan Iuran

Definisi	:	Penerima Bantuan Iuran adalah penerima layanan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah, Baik APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Referensi Pemilihan	:	Dinas Sosial Tahun 2023
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Alias	:	Tabel 3.19.5
Konsep	:	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Definisi	:	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya yang menerima Bantuan Sosial
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Berdasarkan Jenisnya
Alias	:	Tabel 3.19.6
Konsep	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Definisi	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Deseember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penyandang Disabilitas
Alias	:	Tabel 3.19.7
Konsep	:	Penyandang Disabilitas
Definisi	:	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lansia yang tidak Potensial yang menerima Jaminan Sosial

Alias	:	Tabel 3.19.8
Konsep	:	Lansia tidak potensial
Definisi	:	Lanjut usia yang tidak potensial adalah Lanjut Usia Telantar, seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu dan menerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Referensi Waktu	:	2021-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Alias	:	Tabel 3.19.9
Konsep	:	Penyandang Disabilitas Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Definisi	:	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan Miskin yang mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Pemerintah
Referensi Pemilihan	:	Dinas Sosial Tahun 2023
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Graduasi
Alias	:	Tabel 3.19.10
Konsep	:	Keluarga Miskin penerima Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Graduasi

Definisi	:	Keluarga Miskin desil 1 dan 2 yang mendapatkan Program Jamninan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari APBN
Referensi Pemilihan	:	Dinas Sosial Tahun 2023
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan dan Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.19.11
Konsep	:	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
Definisi	:	Jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraan yaitu jumlah keluarga Miskin berdasarkan prosentase garis kemiskinan mulai dari 10% sampai dengan 40% atau Desil 1 sampai desil 4
Referensi Pemilihan	:	Dinas Sosial Tahun 2023
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi
Alias	:	Tabel 3.19.12
Konsep	:	Pendamping penanganan korban dan pengungsi
Definisi	:	Pendamping penanganan korban dan pengungsi adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) atau seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Referensi Waktu	:	2022-2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak
Alias	:	Tabel 3.19.13
Konsep	:	Balita terlantar
Definisi	:	Dinsos Mengelola data kemiskinan P3KE Desil I, hasil olah data ditentukan usia Balita (0-5) Tahunn, Balita terlantar yang diolah dinsos adalah usia 0-5 Tahun dari keluarga Fakir Miskin (P3KE Desil I), terlantar karena kondisi ekonomi keluarga. Tahun 2023 program Bantuan Sosial untuk Balita terlantar melalui PKH sudah tidak menjadi komponen lagi.
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
Alias	:	Tabel 3.19.15
Konsep	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS SOSIAL

Nama Variabel	:	Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Konsep	:	Korban Penyalahgunaan Napza/Narkotika
Definisi	:	Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis. NAPZA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Fakir Miskin Menurut Kecamatan
Konsep	:	Keluarga Fakir Miskin
Definisi	:	Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penerima Bantuan Iuran menurut sumber pendanaan
Konsep	:	Penerima Bantuan Iuran
Definisi	:	Penerima Bantuan Iuran adalah penerima layanan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah, Baik APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan sumber pendanaan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Konsep	:	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
Definisi	:	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya yang menerima Bantuan Sosial
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Berdasarkan Jenisnya
Konsep	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis PPKS

Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penyandang Disabilitas
Konsep	:	Penyandang Disabilitas
Definisi	:	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Lansia yang tidak Potensial yang menerima Jaminan Sosial
Konsep	:	Lansia tidak potensial
Definisi	:	Lanjut usia yang tidak potensial adalah Lanjut Usia Telantar, seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu dan menerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Konsep	:	Penyandang Disabilitas Miskin Dan Rentan Yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Definisi	:	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan Miskin yang mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Pemerintah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah

Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Graduasi
Konsep	:	Keluarga Miskin penerima Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Graduasi
Definisi	:	Keluarga Miskin desil 1 dan 2 yang mendapatkan Program Jamninan Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari APBN
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan dan Kecamatan
Konsep	:	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan
Definisi	:	Jumlah keluarga menurut tingkat kesejahteraan yaitu jumlah keluarga Miskin berdasarkan prosentase garis kemiskinan mulai dari 10% sampai dengan 40% atau Desil 1 sampai desil 4
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan tingkat kesejahteraan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi
Konsep	:	Pendamping penanganan korban dan pengungsi
Definisi	:	Pendamping penanganan korban dan pengungsi adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) atau seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak

Konsep	:	Balita terlantar
Definisi	:	Dinsos Mengelola data kemiskinan P3KE Desil I, hasil olah data ditentukan usia Balita (0-5) Tahunn, Balita terlantar yang diolah dinsos adalah usia 0-5 Tahun dari keluarga Fakir Miskin (P3KE Desil I), terlantar karena kondisi ekonomi keluarga. Tahun 2023 program Bantuan Sosial untuk Balita terlantar melalui PKH sudah tidak menjadi komponen lagi.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
Konsep	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Perumahan Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Perwilayahan Dan Perkotaan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA

Instansi Penyelenggara	:	Dinas Perumahan Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Gedung Lingkup Pu Komplek Perkantoran

		Tigaraksa
Email	:	dinasperkimtgr@gmail.com
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Alamat	:	Gedung Lingkup Pu Komplek Perkantoran Tigaraksa
Email	:	dinasperkimtgr@gmail.com
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Di Kabupaten Tangerang Dimaksudkan Sebagai Salah Satu Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang Melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Dalam Menyediakan Data Terkini Tentang Kondisi Eksisting Perumahan Khususnya Terkait Rumah Sewa Milik Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Tangerang. Kegiatan Ini Diambil Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Dan Pelaporan Kinerja Serta Kebutuhan Lainnya
Tujuan Kegiatan	:	Kegiatan Bertujuan Untuk Menyediakan Basis Data Terkini Tentang Jumlah Rumah Sewa Milik Masyarakat Sebagai Acuan Atau Dasar Dalam Perencanaan Terkait Bidang Perumahan Di Kabupaten Tangerang
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Jumlah tempat pemakaman umum - Jumlah Rumah Layak Huni - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

- Jumlah Lingkungan Perumahan
- Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
- Luas Kawasan Permukiman Kumuh

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Dinas Perumahan Permukiman Dan Pemakaman Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		4 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum

Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak

Waktu ketersediaan Produk Kegiatan

Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN

Nama Variabel	:	Jumlah tempat pemakaman umum
Alias	:	Tabel 3.16.2
Konsep	:	Tempat Pemakaman Umum
Definisi	:	jumlah TPU yang menjadi aset pemda
Referensi Pemilihan	:	PP Nomor 9 Tahun 1987
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Alias	:	Tabel 3.16.3
Konsep	:	Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Referensi Pemilihan	:	-
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Alias	:	Tabel 3.16.4
Konsep	:	Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Alias	:	Tabel 3.16.4
Konsep	:	Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	:	rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan

Alias	:	Tabel 3.16.5
Konsep	:	Lingkungan Perumahan
Definisi	:	Lingkungan Perumahan adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuaan permukiman yang di kelola swasta dan sudah serah terimakan ke pemerintah Daerah
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kab. Tangerang No 4 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan, Dan Permukiman.
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Alias	:	Tabel 3.16.5
Konsep	:	Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Referensi Pemilihan	:	Peraturan Daerah Kab. Tangerang No 4 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Perumahan, Dan Permukiman. Dan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah tempat pemakaman umum
Konsep	:	Tempat Pemakaman Umum
Definisi	:	jumlah TPU yang menjadi aset pemda
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	TPU

Nama Variabel	:	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Konsep	:	Kawasan Permukiman Kumuh
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Luas

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Layak Huni
Konsep	:	Rumah Layak Huni
Definisi	:	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rumah

Nama Variabel	:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Konsep	:	Rumah Tidak Layak Huni
Definisi	:	rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni

Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Rumah

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan
Konsep	:	Lingkungan Perumahan
Definisi	:	Lingkungan Perumahan adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuaan permukiman yang di kelola swasta dan sudah serah terimakan ke pemerintah Daerah
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lingkungan Perumahan

Nama Variabel	:	Jumlah Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Konsep	:	Lingkungan Perumahan yang Di dukung PSU
Definisi	:	Lingkungan Perumahan yang dilengkapi dengan kelengkapan pisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat aman dan terjangkau
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Lingkungan Perumahan

MS-KEG KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS TENAGA KERJA

Judul Kegiatan	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
Cara Pengumpulan Data	:	Kompilasi Data Statistik Sektoral
Sektor Kegiatan	:	Ketenagakerjaan
Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik	:	-

PENYELENGGARA		
Instansi Penyelenggara	:	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang
Alamat Lengkap Instansi	:	Jl. Parahu Rt/rw. 005/001 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang
Email	:	disnaker@tangerangkab.go.id
PENANGGUNG JAWAB		
Penanggung Jawab Teknis	:	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dan Pengelolaan Data
Alamat	:	Jl. Parahu Rt/rw. 005/001 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang
Email	:	disnaker@tangerangkab.go.id
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		
Latar Belakang Kegiatan	:	Kegiatan Ini Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang Nomor : 800.007/598-diskominfo Tanggal 20 April 2022 Perihal : Penyampaian Ketercapaian Dan Statistik Sektoral, Bahwa Setiap Perangkat Daerah Harus Melengkapi Data Statistik Sektoral.
Tujuan Kegiatan	:	1.Mewujudkan Ketersediaan Data Ketenagakerjaan Yang Terstandar, Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses Dan Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan. 2. Mendorong Keterbukaan Dan Transparansi Data Ketenagakerjaan Sehingga Tercipta Perencanaan Dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan Yang Berbasis Pada Data. 3. Meningkatkan Kualitas Dan Integritas Data Ketenagakerjaan Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Di Sektor Ketenagakerjaan. 4. Sebagai Acuan Pelaksanaan Dan Pedoman Bagi Instansi Pusat Dan Instansi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan,

		Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan Dapat Segera Diimplementasikan
Jadwal Kegiatan	:	
Perencanaan/Persiapan		08 November 2022 s.d. 02 Februari 2023
Pengumpulan Data		03 Maret 2023 s.d. 20 Desember 2023
Pengolahan		01 Maret 2024 s.d. 30 April 2024
Analisis		01 April 2024 s.d. 30 April 2024
Diseminasi		01 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan	:	- Jumlah pekerja yang menjadi peserta jamsostek - Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja - Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama - Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin - Jumlah pencari Kerja yang ditempatkan - Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

DESAIN KEGIATAN		
Kegiatan ini dilakukan	:	Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan	:	Tahunan
Tipe Pengumpulan Data	:	*Longitudinal Cross Sectional*
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	:	Sebagian Wilayah Indonesia, yaitu Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Metode Pengumpulan Data	:	Pengumpulan Data Sekunder
Sarana Pengumpulan Data	:	Mail
Unit Pengumpulan Data	:	Lainnya (Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang)

PENGUMPULAN DATA		
Petugas Pengumpulan Data	:	Staf Instansi Penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	:	Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas	:	
Supervisor/Penyelia/Pengawas		1 Orang
Pengumpul Data/Enumerator		4 Orang
Melakukan Pelatihan Petugas ?	:	Tidak

PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
Tahapan Pengolah Data		
Penyuntingan	:	Tidak
Penyandian	:	Tidak
Data Entry	:	Ya
Validasi	:	Ya
Metode Analisis	:	Deskriptif
Unit Analisis	:	Organisasi Perangkat Daerah
Tingkat Penyajian Data	:	Organisasi Perangkat Daerah

DISEMINASI HASIL		
Produk Kegiatan yang tersedia untuk Umum		
Tercetak	:	Ya
Digital	:	Ya
Data Mikro	:	Tidak
Waktu ketersediaan Produk Kegiatan		
Tercetak	:	31 Mei 2024
Digital	:	31 Mei 2024
Data Mikro	:	-

MS-VAR KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL
DINAS TENAGA KERJA

Nama Variabel	:	Jumlah pekerja yang menjadi peserta jamsostek
Alias	:	Tabel 3.20.2
Konsep	:	Pekerja yang menjadi peserta jamsostek

Definisi	:	Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Referensi Pemilihan	:	- Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - UU Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di Indonesia.
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja
Alias	:	Tabel 3.20.3
Konsep	:	kasus sengketa pengusaha pekerja
Definisi	:	Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
Referensi Pemilihan	:	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Referensi Waktu	:	2022-2023

Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Alias	:	Tabel 3.20.3
Konsep	:	kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Definisi	:	Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	:	2022-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin
Alias	:	Tabel 3.20.4
Konsep	:	Pencari Kerja

Definisi	:	pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik didalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja menurut jenis kelamin
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	:	1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Alias	:	Tabel 3.20.5
Konsep	:	Pencari kerja yang ditempatkan
Definisi	:	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Penempatan pencari kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
Referensi Pemilihan	:	Undang-undang no 39 tahun 2016 tentang penempatan ketenaga kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Repubik Indonesia Nomor : Per.07/Men/Iv/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
Referensi Waktu	:	2020-2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	-
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Alias	:	Tabel 3.20.6
Konsep	:	Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Definisi	:	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja menurut tingkat pendidikan
Referensi Pemilihan	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Referensi Waktu	:	2021- 2023
Tipe Data	:	*Integer*
Klasifikasi Isian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
Aturan Validasi	:	Harus berisi angka
Akses Publikasi	:	Terbuka

STANDAR DATA KOMPILASI DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS TENAGA KERJA

Nama Variabel	:	Jumlah pekerja yang menjadi peserta jamsostek
Konsep	:	Pekerja yang menjadi peserta jamsostek
Definisi	:	Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja
Konsep	:	Kasus sengketa pengusaha pekerja
Definisi	:	Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Konsep	:	kasus sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Definisi	:	Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin
Konsep	:	Pencari Kerja

Definisi	:	pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik didalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja menurut jenis kelamin
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Konsep	:	Pencari kerja yang ditempatkan
Definisi	:	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Penempatan pencari kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
Klasifikasi Penyajian	:	-
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang

Nama Variabel	:	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Konsep	:	Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Definisi	:	Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja menurut tingkat pendidikan
Klasifikasi Penyajian	:	Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan
Ukuran	:	Jumlah
Satuan	:	Orang